

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu `alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dapat diselesaikan.

LAKIP BPBD Provinsi NTB Tahun 2018 ini disusun sebagai wujud dan bagian dari pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi BPBD Provinsi NTB, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan BPBD Provinsi NTB sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi BPBD Provinsi NTB yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan di sepanjang tahun 2018

Meskipun telah diupayakan secara optimal, namun kami sadari bahwa LAKIP BPBD Provinsi NTB Tahun 2018 ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami berharap masukan dari berbagai pihak guna perbaikan LAKIP selanjutnya, sehingga dapat lebih informatif dan akuntabel.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini, semoga LAKIP BPBD Provinsi NTB Tahun 2018 dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan media koreksi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja.

*Wassalamu `alaikum Warahmatullah wabarakatuh*

Mataram, Januari 2019

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KEPALA PELAKSANA,

Ir. H. Mohammad Rum, MT  
NIP. 19660316 199402 1 001

# **RINGKASAN EKSEKUTIF RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018**

## **I. PENDAHULUAN**

Kejadian bencana alam gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan hal yang unik dan memiliki keistimewaan tersendiri. Wilayah Nusa Tenggara Barat (Luas 210.152 km<sup>2</sup>) terdiri dari Pulau Lombok (4.738 km<sup>2</sup>) dan Pulau Sumbawa (15.414 km<sup>2</sup>), berada pada gugusan rings of fire (cincin gunung berapi) dan diapit dua sesar utama gempa bumi pada bagian selatan dan utara, sehingga termasuk kawasan rawan bencana alam massive dengan 9 jenis bencana antara lain: gunung meletus, gempa bumi, Banjir, Kekeringan, tanah longsor, angin puting beliung, abrasi air laut, kebakaran hutan, dan tsunami.

Salah satu jenis bencana yang melanda wilayah NTB tidak dapat diprediksi adalah bencana alam gempa seperti yang telah melanda wilayah NTB pada tanggal 29 Juli 2018 kekuatan 6.4 SR, gempa kedua tanggal 5 Agustus 2018 kekuatan 7.0 SR, pada tanggal 9 Agustus 2018 dengan kekuatan 6.2 SR, dan gempa keempat pada tanggal 19 Agustus 2018 dengan kekuatan 6.9 SR serta 2087 kali gempa susulan, kekuatan 1 – 4 SR. Wilayah terdampak gempa bumi NTB adalah Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat serta beberapa wilayah di Pulau Bali seperti Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar.

Bencana alam Gempa Nusa Tenggara Barat mengakibatkan 564 jiwa meninggal dunia dan 1.584 orang luka-luka, 396.032 mengungsi. Kerusakan prasarana dan sarana skala besar seperti: rumah penduduk (149.715 unit), gedung kantor, prasarana transportasi darat, prasarana sumber daya air, fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, hotel, toko dan berbagai fasilitas umum lainnya. Pusat gempa di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur. Gempa Lombok ini mengakibatkan rusaknya berbagai fasilitas umum dan infrastruktur yang berada di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Kota Mataram.

Tahapan Penanganan Bencana Gempa NTB telah dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dimulai dengan masa Tanggap Darurat berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360 – 611 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Provinsi NTB (29 Juli – 4 Agustus 2018) diperpanjang sampai tanggal 25 Agustus

2018, dimana prioritas kegiatan melakukan evakuasi dan penyelamatan jiwa, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, perlindungan kelompok rentan (wanita, anak-anak, ibu hamil dan usia lanjut). Pendataan dampak kerusakan bencana dan pemulihan prasarana umum juga dilaksanakan pada masa Tanggap Darurat.

Setelah masa Tanggap Darurat berakhir, dilanjutkan dengan masa Transisi Darurat ke Pemulihan sesuai Surat Keputusan Gubernur NTB nomor 360 – 696 tanggal 29 Agustus 2018 berlaku sampai 17 September 2018, karena pergantian masa jabatan Gubernur NTB. Pada periode ini prioritas penanganan kebutuhan dasar masyarakat pengungsi dan pembangunan prasarana sementara (rumah, tempat ibadah, fasilitas pendidikan, perkantoran, kesehatan), melakukan rehabilitasi prasarana vital seperti jaringan listrik, prasarana sumber daya air, prasarana transportasi, prasarana kesehatan, dan prasarana perkantoran.

Selanjutnya Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana alam gempa selama 2 tahun dari tahun 2019 – 2020 bertujuan untuk mengembalikan dan memulihkan fungsi 5 sektor utama yaitu sektor permukiman, sektor infrastruktur, Sektor ekonomi, Sektor sosial dan Lintas sektor secara bersamaan dan terpadu di seluruh wilayah Kabupaten/Kota terdampak di wilayah Nusa Tenggara Barat (7 Kabupaten/Kota).

## **II. KRONOLOGIS KEJADIAN GEMPA**

Pada tanggal 29 Juli 2018 pukul 06:47:38 WITA, wilayah Lombok diguncang gempabumi tektonik. Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempabumi ini berkekuatan  $M=6.4$ . Episenter terletak pada kordinat 8.35 LS dan 116.5 BT atau tepatnya pada jarak 47 km Timur Laut Kota Mataram pada kedalaman 24 km. Guncangan gempabumi ini dilaporkan telah dirasakan di daerah Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, dan Sumbawa Besar pada skala II SIG-BMKG (III-V MMI).

Pada tanggal 5 Agustus 2018 pukul 19:46:35 WITA gempabumi kembali mengguncang Lombok dengan  $M=7.0$ . Episenter terletak pada koordinat 8.37 LS dan 116.48 BT atau tepatnya pada jarak 18 km Barat Laut Kabupaten Lombok Timur pada kedalaman 15 km. Mengingat episenternya relatif sama dengan gempabumi yang terjadi pada 29 Juli 2018, maka BMKG menyatakan bahwa gempabumi ini merupakan gempabumi utama (Main Shock) dari rangkaian gempabumi yang terjadi sebelumnya. BMKG mencatat adanya 601 gempabumi pendahuluan (Fore Shock) sebelum gempabumi ini. Dampak gempabumi ini dirasakan di daerah Lombok pada skala IV-V SIG-BMKG (VII-X MMI). Hingga tanggal 13 September 2018 pukul 08.00 WITA, BMKG mencatat 925 gempabumi susulan dari gempabumi ini.

Gempa susulan signifikan setelah gempabumi utama tanggal 5 Agustus 2018 adalah gempabumi tanggal 9 Agustus 2018 pukul 13:25:33 WITA dengan kekuatan  $M=5.9$ . Episenter terletak pada koordinat 8.49 LS dan 116.19 BT atau tepatnya pada jarak 13 km Timur Laut Kota Mataram pada kedalaman 16 km. Guncangan gempabumi ini dilaporkan telah dirasakan di daerah Lombok Utara III SIG-BMKG (VI MMI), Mataram II SIG-BMKG (V MMI), dan Sumbawa pada skala II SIG-BMKG (III MMI).

**Peta Kekuatan Guncangan Gempabumi Lombok  
Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB)**



**Gambar 1 Peta kekuatan guncangan gempa bumi Lombok Provinsi NTB**  
Sumber: Inarisk - BNPB, 2018

Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2018, terdapat 2 gempabumi susulan signifikan akibat gempabumi utama tanggal 5 Agustus 2018. Pertama gempabumi yang terjadi pukul 12:06:13 WITA dengan kekuatan  $M=5.4$ . Episenter terletak pada koordinat 8.29 LS dan 116.62 BT atau tepatnya pada jarak 25 km Timur Laut Kabupaten Lombok Timur pada kedalaman 10 km. Gempabumi kedua yaitu gempabumi yang terjadi pukul 12:10:22 WITA. Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempabumi ini berkekuatan  $M=6.3$ . Episenter terletak pada koordinat 8.24 LS dan 116.66 BT atau tepatnya pada jarak 32 km Timur Laut Kota Mataram pada kedalaman 14 km. Guncangan gempabumi ini dilaporkan telah dirasakan di Lombok Utara III SIG-BMKG (VI MMI), di Mataram II SIG-BMKG (IV MMI), di Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Bima, dan Sumbawa Besar II SIG-BMKG (III MMI), di Denpasar, Waingapu dan Jimbaran I SIG-BMKG (II MMI).

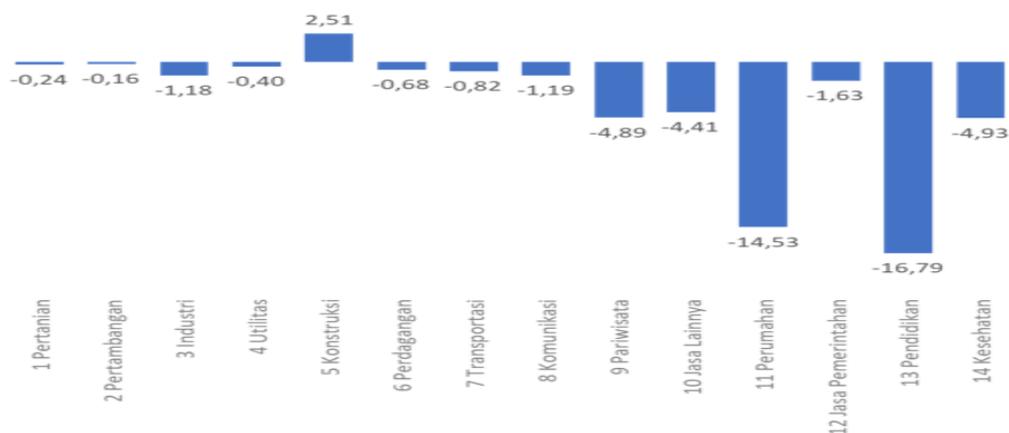
Pada tanggal 19 Agustus 2018 pukul 22:56:27 WITA gempa bumi signifikan kembali mengguncang Lombok dengan  $M=6.9$ . Episenter terletak pada koordinat 8.44 LS dan 116.68 BT atau tepatnya pada jarak 18 km BaratLaut Kabupaten Lombok Timur pada kedalaman 15 km. Dengan memperhatikan lokasi episenter gempa bumi yang terletak di ujung timur Pulau Lombok dan diikuti sebaran episenter gempa bumi yang mengikutinya yang membentuk kluster episenter dengan sebaran kearah timur hingga di sebelah utara Sumbawa Barat maka dapat disimpulkan bahwa gempa bumi yang terjadi merupakan aktivitas gempa bumi baru yang berbeda dengan gempa bumi  $M=7.0$  tanggal 5 Agustus 2018. Dampak gempa bumi ini dirasakan di daerah Lombok dan Sumbawa pada skala II-IV SIG-BMKG (V-VII MMI). Hingga tanggal 13 September 2018 pukul 08.00 WITA, BMKG mencatat 543 gempa susulan dari gempa bumi ini.

Hasil analisis mekanisme sumber gempa bumi  $M=7.0$  tanggal 5 Agustus 2018 dan gempa bumi  $M=6.9$  tanggal 19 Agustus 2018 menunjukkan bahwa gempa bumi ini dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan naik (thrust fault). Jika ditinjau dari kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif, hasil interaksi sesar naik busur belakang Flores (Flores Back Arc Thrust). Total kejadian gempa bumi dari tanggal 29 Juli 2018 hingga 13 September 2018 pukul 08.00 WITA adalah 2069 kejadian gempa bumi. Jumlah kejadian gempa bumi dirasakan mulai tgl 29 Juli hingga 14 September adalah 123 kejadian gempa bumi dirasakan.

### III. DAMPAK GEMPA PADA ASPEK EKONOMI, SOSIAL DAN LINGKUNGAN

#### 3.1. Aspek Ekonomi

Hasil analisis BAPPENAS (2018), dampak ekonomi dari gempa bumi yang terjadi di Provinsi NTB adalah penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1.5%.

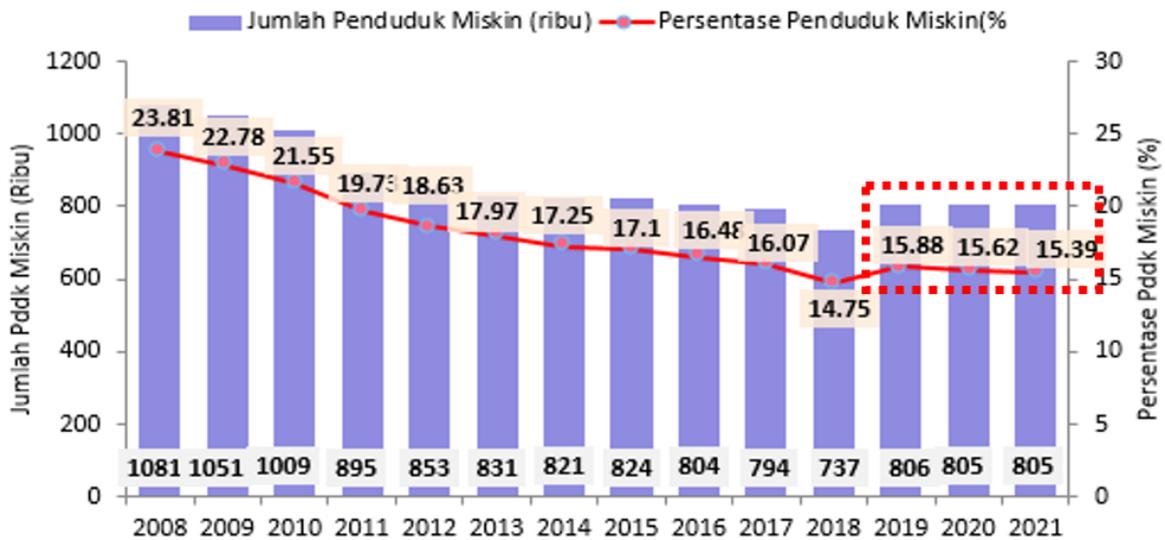


Sumber: Simulasi CGE Indoterm, Bappenas

Sektor yang paling terkena dampak dari gempa NTB adalah sektor pendidikan dan permukiman. Sektor pendidikan akan mengalami penurunan output sebesar 16.8% dan sektor permukiman akan mengalami penurunan sebesar 14.5% pada tahun 2018. Disamping itu, sektor pariwisata (akomodasi, makanan dan minuman) yang merupakan salah satu prioritas pembangunan di NTB akan terdampak dengan penurunan sebesar 4.9%.

### 3.2. Aspek Sosial

Hasil analisis BAPPENAS (2018) menunjukkan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1.5% akan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 806.430 jiwa atau 15.88% pada tahun 2019.

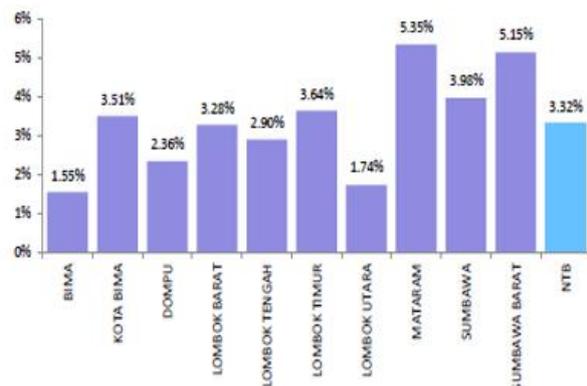


Terkait sektor ketenagakerjaan, gempa bumi di Provinsi NTB juga berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Prov. NTB



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota Tahun 2017



Hasil analisis BAPPENAS (2018) menunjukkan bahwa gempa yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1.5% akan meningkatkan jumlah penganggur sebesar 180.000 orang pada tahun 2018. Pengangguran ini diperkirakan berasal dari sektor pariwisata, perdagangan, pertanian, dan industri. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah daerah perlu memperhatikan penciptaan kesempatan kerja pasca bencana melalui program padat karya infrastruktur, pelatihan ketenagakerjaan, dan pengembangan ekonomi lokal.

Masyarakat terdampak yang mengalami kerusakan rumah sesuai hasil verifikasi rumah rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat per tanggal 12 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Hasil verifikasi rumah rusak**

No	Wilayah (Kab./Kota)	Laporan Rumah Rusak			
		RB	RS	RR	Jumlah
<b>A. PULAU LOMBOK</b>		67,103	23,444	80,627	171,174
1	Lombok Utara	41,386	128	379	41,893
2	Lombok Barat	13,942	12,668	45,612	72,222
3	Lombok Timur	6,495	2,232	9,888	18,615
4	Lombok Tengah	2,884	5,639	16,484	25,007
5	Mataram	2,396	2,777	8,264	13,437
<b>B. PULAU SUMBAWA</b>		2,297	4,876	9,792	16,965
1	Sumbawa	1,193	1,576	4,584	7,353
2	Sumbawa Barat	1,104	3,300	5,208	9,612
<b>JUMLAH (A+B)</b>		<b>69,400</b>	<b>28,320</b>	<b>90,419</b>	<b>188,139</b>

Sumber: BNPB, 2018

### 3.3. Aspek lingkungan

Dampak lingkungan pasca kejadian gempa menjadi satu sub sektor dalam pembahasan di lintas sektor. Kerusakan pemukiman pasca gempa, mengakibatkan masyarakat banyak yang memilih untuk tinggal di tenda pada daerah yang relative terbuka. Hal ini menimbulkan persoalan tersendiri akibat penumpukan sampah yang diproduksi oleh para penyintas dan perlu menjadi perhatian serius. Selain itu, kondisi darurat dengan minimnya sarana-prasarana pendukung seperti MCK juga menjadi satu persoalan tersendiri. Keberadaan rumah sakit darurat yang tersebar di sekitar lokasi penyintas berada juga perlu mendapat perhatian terkait pembuangan sampah medis yang memerlukan penanganan khusus.

Penanganan timbulan sampah di lokasi pengungsian yaitu pengangkutan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung, upaya pemilahan dan pengolahan sampah medis dan non medis serta penyediaan MCK yang memadai perlu menjadi perhatian serius untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Dampak lingkungan perlu mendapat penekanan khusus mengingat dampak yang akan ditimbulkan kedepan.

## **IV. PERKIRAAN KERUSAKAN, KERUGIAN, DAN KEBUTUHAN**

### **4.1. Indikasi Kerusakan dan Kerugian**

Penilaian akibat gempa merupakan suatu kajian atas akibat langsung dan tidak langsung kejadian bencana gempa terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Komponen penilaian akibat gempa terdiri dari kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi, dan meningkatnya resiko. Selanjutnya, komponen pengkajian dampak meliputi pengkajian dampak bencana terhadap aspek-aspek ekonomi-fiskal, sosial-budaya-politik, pembangunan manusia, dan infrastruktur lingkungan secara agregat (total). Pengkajian dampak bencana merupakan pengkajian yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang. Hal ini bermanfaat untuk mengkaji kebutuhan pemulihan pasca bencana memiliki orientasi strategis dalam jangka menengah dan jangka panjang.

*Tabel 2 Rekapitulasi Nilai Kerusakan dan Kerugian Per Kabupaten/Kota*

No	Wilayah/ Kab./Kota	Nilai (Rp)		
		Kerusakan	Kerugian	TOTAL
<b>A. PULAU LOMBOK</b>		<b>11.321.375.963.098</b>	<b>5.647.361.582.881</b>	<b>16.968.737.545.979</b>
1	KABUPATEN LOMBOK UTARA	5.479.211.198.187	4.511.974.057.264	9.991.185.255.451
2	KABUPATEN LOMBOK BARAT	3.071.492.354.677	436.110.294.563	3.507.602.649.240
3	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	1.056.986.066.995	470.591.853.915	1.527.577.920.910
4	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	672.178.789.638	177.869.661.139	850.048.450.777
5	KOTA MATARAM	1.041.507.553.601	50.815.716.000	1.092.323.269.601
<b>B. PULAU SUMBAWA</b>		<b>1.015.010.976.014</b>	<b>215.573.231.449</b>	<b>1.230.584.207.463</b>
6	KABUPATEN SUMBAWA	561.890.962.894	98.096.332.133	659.987.295.027
7	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	453.120.013.120	117.476.899.316	570.596.912.436
<b>Total</b>		<b>12.336.386.939.112</b>	<b>5.862.934.814.330</b>	<b>18.199.321.753.442</b>

Sumber: Hasil finalisasi rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi BAPPEDA NTB tanggal 20 Oktober 2018

**Tabel 3 Rekapitulasi Nilai Kerusakan dan Kerugian Per Sektor**

No	Sektor/Sub Sektor	Nilai		
		Kerusakan	Kerugian	TOTAL (Rusak+Rugi)
1	SEKTOR PERMUKIMAN	8.749.510.450.000	4.547.999.274.230	13.297.509.724.230
2	SEKTOR INFRASTRUKTUR	408.987.683.426	27.132.735.563	436.120.418.989
3	SEKTOR SOSIAL	2.280.743.956.878	263.206.172.282	2.543.950.129.160
4	SEKTOR EKONOMI	386.279.702.299	850.648.896.577	1.236.928.598.876
5	SEKTOR LINTAS SEKTOR	510.865.146.509	173.947.735.678	684.812.882.187
<b>Total</b>		<b>12.336.386.939.112</b>	<b>5.862.934.814.330</b>	<b>18.199.321.753.442</b>

Sumber: Hasil finalisasi rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi BAPPEDA NTB tanggal 20 Oktober 2018



### Kabupaten Lombok Utara

No	Sektor/Sub Sektor	Kab. Lombok Utara (Rp)			
		Kerusakan	Kerugian	TOTAL (Rusak+Rugi)	Kebutuhan
1	SEKTOR PERMUKIMAN	3.505.485.200.000	3.731.409.800.000	7.236.895.000.000	3.182.787.143.000
2	SEKTOR INFRASTRUKTUR	303.676.794.062	15.943.406.000	319.620.200.062	471.556.296.279
3	SEKTOR SOSIAL	1.160.633.995.036	169.893.013.566	1.330.527.008.602	1.056.558.750.000
4	SEKTOR EKONOMI	274.310.973.839	428.718.820.000	703.029.793.839	499.525.111.400
5	SEKTOR LINTAS SEKTOR	235.104.235.250	166.009.017.698	401.113.252.948	389.195.154.943
<b>Total</b>		<b>5.479.211.198.187</b>	<b>4.511.974.057.264</b>	<b>9.991.185.255.451</b>	<b>5.599.622.455.622</b>

Sumber: Hasil finalisasi rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi BAPPEDA NTB tanggal 20 Oktober 2018

### Kabupaten Lombok Barat

No	Sektor/Sub Sektor	Kab. Lombok Barat (Rp)			
		Kerusakan	Kerugian	TOTAL (Rusak+Rugi)	Kebutuhan
1	SEKTOR PERMUKIMAN	2.753.808.200.000	348.295.700.000	3.102.103.900.000	1.530.026.000.000
2	SEKTOR INFRASTRUKTUR	10.688.792.226	10.919.099.563	21.607.891.789	149.072.951.000
3	SEKTOR SOSIAL	261.307.070.000	20.311.610.000	281.618.680.000	336.851.113.500
4	SEKTOR EKONOMI	31.284.320.000	56.401.185.000	87.685.505.000	37.777.800.000
5	SEKTOR LINTAS SEKTOR	14.403.972.451	182.700.000	14.586.672.451	21.945.792.025
<b>Total</b>		<b>3.071.492.354.677</b>	<b>436.110.294.563</b>	<b>3.507.602.649.240</b>	<b>2.075.673.656.525</b>

Sumber: Hasil finalisasi rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi BAPPEDA NTB tanggal 20 Oktober 2018

### Kabupaten Lombok Timur

No	Sektor/Sub Sektor	Kab. Lombok Timur (Rp)			
		Kerusakan	Kerugian	TOTAL (Rusak+Rugi)	Kebutuhan
1	SEKTOR PERMUKIMAN	704.321.200.000	191.601.911.415	895.923.111.415	614.863.000.000
2	SEKTOR INFRASTRUKTUR	64.998.678.500	149.700.000	65.148.378.500	64.629.457.100
3	SEKTOR SOSIAL	220.438.411.523	18.517.200.000	238.955.611.523	408.231.438.742
4	SEKTOR EKONOMI	40.553.178.600	256.353.542.500	296.906.721.100	28.359.107.985
5	SEKTOR LINTAS SEKTOR	26.674.598.372	3.969.500.000	30.644.098.372	34.955.034.145
<b>Total</b>		<b>1.056.986.066.995</b>	<b>470.591.853.915</b>	<b>1.527.577.920.910</b>	<b>1.151.038.037.972</b>

Sumber: Hasil finalisasi rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi BAPPEDA NTB tanggal 20 Oktober 2018

### Kabupaten Lombok Tengah

No	Sektor/Sub Sektor	Kab. Lombok Tengah (Rp)			
		Kerusakan	Kerugian	TOTAL (Rusak+Rugi)	Kebutuhan
1	SEKTOR PERMUKIMAN	565.891.200.000	72.700.942.000	638.592.142.000	466.067.000.000
2	SEKTOR INFRASTRUKTUR	15.898.189.638	32.020.000	15.930.209.638	18.350.445.638
3	SEKTOR SOSIAL	67.780.600.000	460.353.889	68.240.953.889	172.229.990.610
4	SEKTOR EKONOMI	12.816.000.000	104.631.720.250	117.447.720.250	98.402.693.387
5	SEKTOR LINTAS SEKTOR	9.792.800.000	44.625.000	9.837.425.000	17.591.437.286
<b>Total</b>		<b>672.178.789.638</b>	<b>177.869.661.139</b>	<b>850.048.450.777</b>	<b>772.641.566.921</b>

Sumber: Hasil finalisasi rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi BAPPEDA tanggal 20 Oktober 2018

## Kota Mataram

No	Sektor/Sub Sektor	Kota Mataram (Rp)			
		Kerusakan	Kerugian	TOTAL (Rusak+Rugi)	Kebutuhan
1	SEKTOR PERMUKIMAN	474.324.050.000	22.791.250.000	497.115.300.000	299.053.000.000
2	SEKTOR INFRASTRUKTUR	18.000.000	6.700.000	24.700.000	60.000.000
3	SEKTOR SOSIAL	340.494.798.747	26.375.366.000	366.870.164.747	389.034.963.398
4	SEKTOR EKONOMI	23.496.398.360	1.338.300.000	24.834.698.360	12.273.599.539
5	SEKTOR LINTAS SEKTOR	203.174.306.494	304.100.000	203.478.406.494	441.006.095.109
<b>Total</b>		<b>1.041.507.553.601</b>	<b>50.815.716.000</b>	<b>1.092.323.269.601</b>	<b>1.141.427.658.046</b>

Sumber: Hasil finalisasi rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi BAPPEDA NTB tanggal 20 Oktober 2018

## Kabupaten Sumbawa

No	Sektor/Sub Sektor	Kabupaten Sumbawa (Rp)			
		Kerusakan	Kerugian	TOTAL (Rusak+Rugi)	Kebutuhan
1	SEKTOR PERMUKIMAN	385.956.000.000	94.125.004.479	480.081.004.479	251.177.000.000
2	SEKTOR INFRASTRUKTUR	13.707.229.000	81.810.000	13.789.039.000	130.801.158.000
3	SEKTOR SOSIAL	139.090.307.344	1.799.128.827	140.889.436.171	149.716.686.057
4	SEKTOR EKONOMI	2.963.831.500	1.922.828.827	4.886.660.327	3.388.588.000
5	SEKTOR LINTAS SEKTOR	20.173.595.050	167.560.000	20.341.155.050	16.520.081.550
<b>Total</b>		<b>561.890.962.894</b>	<b>98.096.332.133</b>	<b>659.987.295.027</b>	<b>551.603.513.607</b>

Sumber: Hasil finalisasi rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi BAPPEDA NTB tanggal 20 Oktober 2018

## Kabupaten Sumbawa Barat

No	Sektor/Sub Sektor	Kab. Sumbawa Barat (Rp)			
		Kerusakan	Kerugian	TOTAL (Rusak+Rugi)	Kebutuhan
1	SEKTOR PERMUKIMAN	359.724.600.000	87.074.666.336	446.799.266.336	404.234.000.000
2	SEKTOR INFRASTRUKTUR	-	-	-	-
3	SEKTOR SOSIAL	90.998.774.228	25.849.500.000	116.848.274.228	103.028.760.040
4	SEKTOR EKONOMI	855.000.000	1.282.500.000	2.137.500.000	1.050.000.000
5	SEKTOR LINTAS SEKTOR	1.541.638.892	3.270.232.980	4.811.871.872	2.016.864.490
<b>Total</b>		<b>453.120.013.120</b>	<b>117.476.899.316</b>	<b>570.596.912.436</b>	<b>510.329.624.530</b>

Sumber: Hasil finalisasi rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi BAPPEDA NTB tanggal 20 Oktober 2018



## 4.2. Indikasi Kebutuhan

Indikasi kebutuhan pendanaan per kabupaten dan per sektor dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 berikut ini:

*Tabel 4 Penilaian kebutuhan per kabupaten*

No	Wilayah/ Kab./Kota	Kebutuhan (Rp)
<b>A. PULAU LOMBOK</b>		<b>10.740.403.375.086</b>
1	KABUPATEN LOMBOK UTARA	5.599.622.455.622
2	KABUPATEN LOMBOK BARAT	2.075.673.656.525
3	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	1.151.038.037.972
4	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	772.641.566.921
5	KOTA MATARAM	1.141.427.658.046
<b>B. PULAU SUMBAWA</b>		<b>1.061.933.138.137</b>
6	KABUPATEN SUMBAWA	551.603.513.607
7	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	510.329.624.530
<b>Total</b>		<b>11.802.336.513.222</b>

Sumber: Hasil finalisasi rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi BAPPEDA NTB tanggal 20 Oktober 2018

Jika dilihat dari kebutuhan per sektor, sektor permukiman mencapai 57,18%, sektor sosial mencapai 22.16%, sektor infrastruktur mencapai 7,07% dan lintas sektor mencapai 7,82%, sedangkan sektor ekonomi mencapai 5.77%.

*Tabel 5 Penilaian kebutuhan per sektor*

No	Sektor/Sub Sektor	Kebutuhan (Rp)
1	SEKTOR PERMUKIMAN	6.748.207.143.000
2	SEKTOR INFRASTRUKTUR	834.470.308.017
3	SEKTOR SOSIAL	2.615.651.702.346
4	SEKTOR EKONOMI	680.776.900.311
5	SEKTOR LINTAS SEKTOR	923.230.459.548
<b>Total</b>		<b>11.802.336.513.222</b>

Sumber: Hasil finalisasi rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi BAPPEDA NTB tanggal 20 Oktober 2018

#### **4.3. Identifikasi Sumber Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa pada 7 Kabupaten/Kota terdampak akan didanai oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, serta sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**Tabel 6 Rekap Identifikasi Sumber Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

No	Wilayah/ Kab./Kota	Kebutuhan	Kewenangan (Rp)				Dunia Usaha
			Kab./ Kota	Provinsi	Kemen./Lembaga	Masyarakat	
<b>A. PULAU LOMBOK</b>		<b>10.740.403.375.086</b>	<b>1.788.530.659.907</b>	<b>675.050.399.655</b>	<b>894.607.415.954</b>	<b>7.175.927.967.639</b>	<b>196.657.976.432</b>
1	KABUPATEN LOMBOK UTARA	5.599.622.455.622	1.059.456.266.474	44.575.821.925	329.885.924.223	4.162.917.943.000	2.786.500.000
2	KABUPATEN LOMBOK BARAT	2.075.673.656.525	311.480.700.000	45.754.226.025	11.409.324.000	1.665.053.860.000	32.346.591.000
3	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	1.151.038.037.972	203.480.124.042	69.258.635.485	54.507.175.945	673.848.900.000	149.943.202.500
4	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	772.641.566.921	151.499.085.638	22.179.526.610	22.863.149.286	573.818.269.387	2.281.536.000
5	KOTA MATARAM	1.141.427.658.046	62.614.483.753	493.282.189.610	475.941.842.500	100.288.995.252	9.300.146.932
<b>B. PULAU SUMBAWA</b>		<b>1.061.933.138.137</b>	<b>285.895.062.768</b>	<b>24.927.036.890</b>	<b>22.736.741.893</b>	<b>725.513.468.166</b>	<b>2.842.828.420</b>
6	KABUPATEN SUMBAWA	551.603.513.607	218.165.380.220	20.616.573.927	20.351.176.300	289.627.554.740	2.842.828.420
7	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	510.329.624.530	67.729.682.548	4.310.462.963	2.385.565.593	435.885.913.426	0
<b>TOTAL - NTB</b>		<b>11.802.336.513.222</b>	<b>2.074.425.722.675</b>	<b>699.977.436.545</b>	<b>917.344.157.847</b>	<b>7.901.441.435.805</b>	<b>199.500.804.852</b>

Sumber: Hasil finalisasi rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi BAPPEDA NTB tanggal 20 Oktober 2018

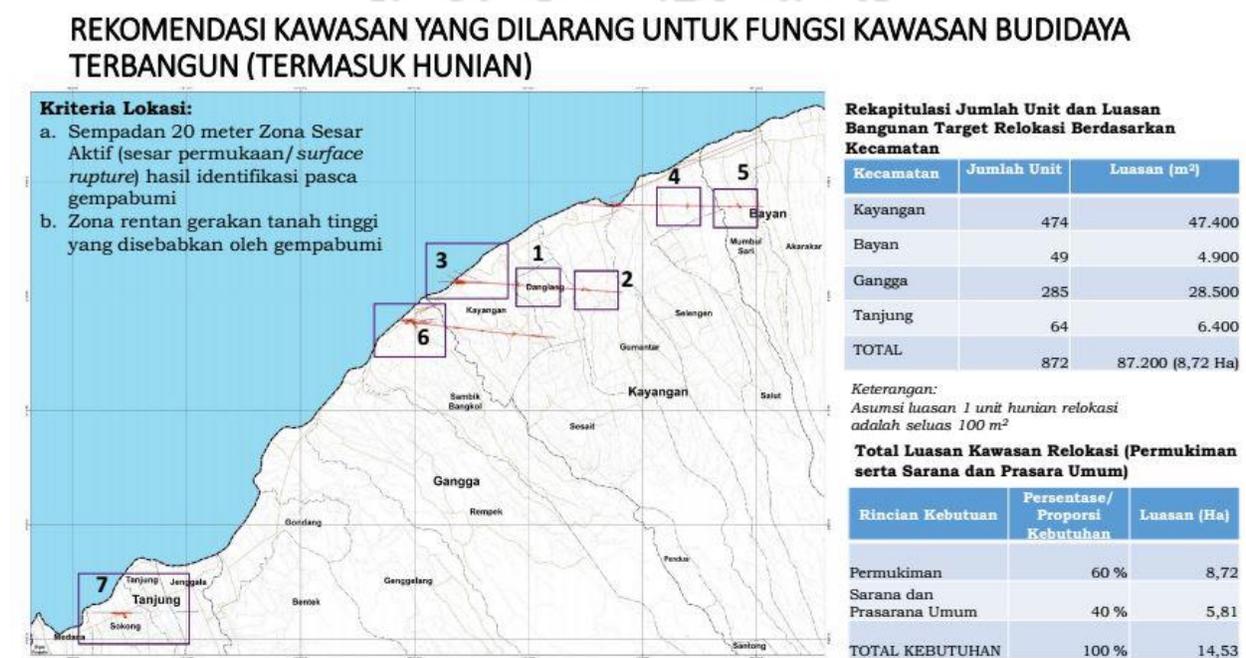
## V. DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA

### 5.1. Kebijakan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kebijakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat diperlukan untuk membantu masyarakat terdampak dan memulihkan kondisi sarana dan prasarana terdampak. Hal ini juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam melaksanakan tugas negara untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### 5.2. Kerangka regulasi

Kerangka regulasi dalam proses percepatan pemulihan kondisi sarana dan prasarana meliputi penilaian kebutuhan pemulihan menurut lokasi dan bidang pemulihan. Untuk sektor perumahan, masyarakat tidak diperbolehkan untuk menetap pada daerah patahan dan pusat gempa, sehingga perlu dilakukan relokasi ke daerah yang bebas gempa. Untuk itu, regulasi terkait pembangunan permukiman baru di lokasi baru memerlukan usulan pengadaan lahan untuk relokasi. Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN RI.



Gambar 2. Rekomendasi kawasan yang dilarang untuk fungsi kawasan budidaya terbangun (termasuk hunian)

Sumber: Kementerian ATR/BPN RI, 2018

Pemerintah Provinsi NTB juga memerlukan dukungan kerangka regulasi dari Pusat untuk kebijakan yang afirmatif untuk kebutuhan pemulihan. Pada sektor perumahan, kebijakan afirmatif yang diperlukan terkait penyediaan lahan jika relokasi kawasan permukiman akan ditempatkan pada kawasan lindung yang memerlukan alih fungsi lahan dan persetujuan Kementerian LHK. Untuk sektor ekonomi, diperlukan pemutihan kredit bagi pengusaha kecil dan industri skala rumah tangga terdampak. Disamping itu, diperlukan juga kemudahan kredit usaha kecil dari Kementerian KUKM dan Kementerian Perindustrian.

### **5.3. Kerangka Kelembagaan**

Pemerintah Provinsi NTB dan 7 Kabupaten/Kota terdampak memerlukan dukungan untuk kerangka kelembagaan dalam bentuk Instruksi Presiden kepada Kementerian/Lembaga terkait tentang Pembentukan Tim Teknis Pusat yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tim Teknis Pusat ini bertugas untuk mengintegrasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor perumahan, sektor infrastruktur, sektor sosial, sektor ekonomi, dan lintas sektor. Tim Teknis Pusat ini sangat dibutuhkan untuk proses asistensi dan pendampingan pusat guna mendukung kinerja Pemerintah Daerah. Belajar dari pengalaman gempa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sumatera Barat, Tim Teknis Pusat telah berkontribusi nyata untuk memperlancar proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dan pengendaliannya.

### **5.4. Kerangka Pembiayaan**

Pemerintah Provinsi NTB memerlukan kepastian kerangka pembiayaan guna menjamin pemenuhan pembiayaannya yang bersumber dari anggaran Kementerian/Lembaga, dan transfer daerah/Dana Desa, termasuk pemanfaatan dana pinjaman luar negeri seperti dari Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) untuk menambah ketersediaan anggaran bagi proses rehabilitasi dan rekonstruksi lebih lanjut. Selain itu, diperlukan kepastian bahwa proses pemulihan melalui rehabilitasi-rekonstruksi-relokasi dapat dilakukan dalam waktu 1-2 tahun, dengan sumber pembiayaan yang mencukupi dari APBN, mengingat keterbatasan APBD Provinsi dan APBD 7 Kabupaten/Kota terdampak di Provinsi NTB.

## **VI. KESIMPULAN**

Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi NTB telah mengindikasikan kebutuhan pendanaan total sebesar Rp. 12.283.911.479.810 untuk sektor perumahan sebesar Rp. 7.141.558.193.000, sektor infrastruktur sebesar Rp 927.776.300.196, sektor sosial sebesar Rp. 2.607.141.293.751, sektor ekonomi sebesar Rp. 680.776.900.311, dan lintas sektor sebesar Rp. 926.658.792.552.

Kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi NTB dan 7 Pemerintah Kabupaten/Kota terdampak, yang meliputi Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki keterbatasan. Untuk itu, dukungan kebijakan, regulasi, kelembagaan, dan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan berbagai sumber lainnya sangat diperlukan untuk percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, sesuai amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan Wilayah Terdampak Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, diperlukan tata kelola yang baik dalam kelembagaan penanganan pasca bencana yang dibentuk sesuai kesepakatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 7 Pemerintah Kabupaten/Kota terdampak

berdasarkan peraturan perundangan. Tujuan utama dari pelaksanaan Rencana Aksi ini adalah memulihkan kondisi sosial dan perekonomian masyarakat. Hal ini juga penting agar seluruh sarana prasarana fisik dan non-fisik yang telah dibangun di lokasi terdampak berfungsi kembali. Tidak hanya memberikan bantuan stimulan dan bangunan fisik semata, namun arahan dan pendampingan dari kelembagaan pemerintahan diperlukan untuk pelaksanaan pemulihan kegiatan masyarakat di semua sektor, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk itu, akuntabilitas dan transparansi diperlukan pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan, terutama karena pola penanganan gempa di Provinsi NTB ini bersifat sangat khusus. Dengan semangat "**NTB Bangun Kembali**" akan mampu mendorong percepatan pemulihan kondisi perekonomian, sosial, sarana dan prasarana wilayah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup di Provinsi NTB

Mataram, 17 Oktober 2018

**GUBERNUR NTB,**

**Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH**



**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUJUAN .....	3
C. URAIAN ORGANISASI .....	4
D. ANALISA ISU STRATEGIS TERKAIT DENGAN TUPOKSI .....	12
E. ANALISA LINGKUNGAN STRATEGI (SWOT) .....	13
F. LANDASAN HUKUM .....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	24
A. PERENCANAAN STRATEGIS .....	24
1. VISI DAN MISI .....	24
2. SASARAN STRATEGIS .....	25
3. INDIKATOR KINERJA .....	27
4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	28
5. PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2018 .....	29
B. PERJANJIAN KINERJA .....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	31
A. CAPAIAN KINERJA BPBD PROVINSI NTB.....	37
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	40
BAB IV PENUTUP.....	43
A. KESIMPULAN.....	43
B. LANGKAH TINDAK LANJUT.....	44
LAMPIRAN	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Distribusi SDM BPBD Provinsi NTB berdasarkan pendidikan .....	11
Tabel 1.2	Distribusi SDM BPBD Provinsi NTB berdasarkan Golongan Tahun 2018 .....	11
Tabel 1.3	Distribusi SDM BPBD Provinsi NTB berdasarkan jabatan .....	11
Tabel 1.4	Distribusi SDM BPBD Provinsi NTB berdasarkan jenis kelamin .....	12
Tabel 1.5	Keterkaitan Masalah dan ISU .....	12
Tabel 1.6	Matriks SWOT .....	16
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	33
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Dalam perjanjian Kinerja.....	36
Tabel 3.2	Indikator Untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Program dan Pelaporan Urusan Kebencanaan .....	37
Tabel 3.3	Indikator Untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan .....	37
Tabel 3.4	Indikator Untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum .....	38
Tabel 3.5	Indikator Untuk Sasaran Terwujudnya Kawasan Tangguh Bencana .....	39
Tabel 3.6	Indikator Untuk Sasaran Terwujudnya Masyarakat yang Sadar dan Tanggap terhadap Bencana .....	40
Tabel 3.7	Indikator Untuk Sasaran Terwujudnya Sistem Penanganan Darurat Bencana Yang Koordinatif .....	40
Tabel 3.8	Indikator Untuk Sasaran Tersedianya Data dan informasi Daerah/Kawasan Rawan Bencana .....	40
Tabel 3.9	Indikator Untuk Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Evakuasi Penanggulangan Bencana .....	41
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja 2017-2018	42
Tabel 3.11	Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2018	44

**DAFTAR GAMBAR**

Grafik 1	Target dan Realisasi Keuangan Program .....	45
Grafik 2	Target dan Realisasi Keuangan Belanja Langsung dan Tidak langsung .....	45



## EXECUTIVE SUMMARY

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang kebencanaan telah melakukan berbagai aktifitas baik terkait langsung maupun tidak langsung dengan perjanjian kinerja Tahun 2018. Indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam pencapaiannya tidak hanya ditentukan dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD, namun juga peran pihak lain cukup signifikan artinya dalam pencapaian indikator tersebut seperti peran dunia usaha dan lembaga non pemerintah. Hal ini telah menginspirasi BPBD Provinsi NTB dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari upaya penanggulangan bencana.

Dengan demikian LAKIP BPBD Provinsi NTB Tahun 2018 memperlihatkan adanya kemajuan (progress) sasaran strategis dan target dari tahun sebelumnya. Sejumlah prestasi kinerja Tahun 2018 yang disajikan dalam LAKIP ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan makin meningkat yang ditunjukkan dengan banyaknya keterlibatan mereka dalam upaya penanggulangan bencana. Namun demikian, berbagai kendala dan permasalahan dalam upaya penanggulangan bencana masih mewarnai segala aktifitas kebencanaan baik sebelum bencana maupun saat bencana atau setelah bencana terjadi. Kedepan BPBD Provinsi NTB akan terus melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dalam mensikapi berbagai fenomena dalam upaya penanggulangan bencana hingga keterlibatan semua stakeholder dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Bagaimana gambaran kinerja BPBD Provinsi NTB Tahun 2018. Berikut ini disajikan sejumlah pencapaian terhadap indikator kinerja dan target sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja yang dikemas dalam buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Terhadap semua pihak yang telah memberikannya dukungan dalam meningkatkan kinerja BPBD Provinsi NTB Tahun 2018 disampaikan terima kasih.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu wilayah provinsi di Indonesia yang rawan terhadap bencana. Tercatat sekitar sebelas jenis bencana terjadi di Provinsi ini seperti tanah longsor, banjir, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran, gempa bumi, tsunami, rob, gunung meletus, konflik sosial, dan sebagainya. Bencana-bencana ini dapat digolongkan berdasarkan penyebab yaitu akibat alam (*natural disaster*) dan non alam (*non natural disaster*). Adapun kejadian bencana yang disebabkan oleh kondisi alam di Nusa Tenggara Barat dipengaruhi oleh kondisi geografis, klimatologis, hidrologis dan topografi, sedangkan bencana non alam disebabkan oleh kondisi demografi yang memiliki keragaman etnis, budaya dan agama.

Pemerintah dan pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana baik secara struktural maupun non struktural. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana terlahir sebagai upaya penanganan kebencanaan di Indonesia secara komprehensif, dimana sebelumnya penanganan bencana dilakukan secara tanggap bencana. Saat ini penanganan kebencanaan dilakukan secara manajerial mulai dari pra-bencana (kesiapsiagaan), saat terjadi bencana (tanggap darurat), sampai pada pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat keseriusan dan komitmen penanganan bencana secara manajerial ditandai dengan lahirnya suatu lembaga yang secara khusus melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana yaitu BPBD Provinsi NTB. Sejak dibentuk pada Tahun 2009 melalui Peraturan Gubernur nomor 14 Tahun 2009, BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan berbagai aktivitas kebencanaan dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dalam kurun waktu

kurang lebih enam tahun berbagai kemajuan telah dicapai baik dalam penanganan fisik kebencanaan maupun dalam penganggaran.

Seiring dengan kondisi kebencanaan di Provinsi NTB yang sarat dengan berbagai kejadian bencana maka BPBD Provinsi NTB membuat strategi penanggulangan bencana yang mengedepankan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat termasuk dunia usaha, kelompok social masyarakat, TNI, POLRI dan instansi teknis terkait. Penguatan kelembagaan menjadi sasaran strategis untuk mendukung strategi yang telah dibuat. BPBD Provinsi NTB yang secara struktural dipimpin oleh Kepala Pelaksana dibantu 3 bidang teknis dan 1 sekretariat mengelola kebencanaan secara manajerial pada 3 tahapan penanggulangan bencana yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. NTB sebagai daerah rawan bencana memerlukan penanganan yang tidak hanya pada saat tanggap darurat saja, akan tetapi pengelolaan prabencana sangat besar artinya dalam rangka pengurangan risiko bencana.

Strategi pengelolaan kebencanaan pada tahap prabencana ditujukan pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman. Strategi ini dikelola dan dikembangkan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Sedangkan pengelolaan kebencanaan pada masa tanggap darurat dilakukan dengan seoptimal mungkin melibatkan banyak pihak tidak hanya dari unsur pemerintah namun juga unsur masyarakat termasuk dunia usaha dan kelompok-kelompok masyarakat. Strategi melibatkan banyak pihak dalam penanganan tanggap darurat dikembangkan dan dikelola oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik. Tidak kalah pentingnya dengan 2 tahap penanganan bencana tersebut, tahap pasca bencana juga dilakukan berbagai strategi penanganan yang dikembangkan dengan tujuan pemulihan pasca bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat sehingga kehidupan masyarakat menjadi normal. Strategi penanganan pasca bencana dikelola dan dikembangkan oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Meskipun pada awal terbentuknya BPBD Provinsi NTB pada Tahun 2009, dukungan anggaran kebencanaan relatif terbatas dibandingkan dengan kondisi kebencanaan yang ada namun berbagai strategi telah dikembangkan dalam rangka mewujudkan masyarakat NTB yang adaptif dan tangguh bencana pada Tahun 2018. Sejuahmana perkembangan penanggulangan bencana di NTB, sangat tergantung dengan kinerja BPBD Provinsi NTB sebagai lembaga/instansi yang memiliki fungsi koordinasi, komando dan pelaksana penanggulangan bencana. Untuk itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun untuk mengetahui kinerja BPBD Provinsi NTB dan sekaligus memahami permasalahan dan kendala.

## **B. TUJUAN**

### **- Tujuan Umum**

Tujuan Secara umum Penyusunan LAKIP BPBD Provinsi NTB Tahun 2018 adalah sebagai informasi publik yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana pada kondisi pra bencana, tanggap darurat (saat bencana) dan pasca bencana.

### **- Tujuan Khusus**

Adapun Tujuan Khusus penyusunan LAKIP BPBD Provinsi NTB Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan penilaian kembali pencapaian visi dan Misi dalam upaya penanggulangan bencana;
- b. Sebagai bahan penilaian kembali pencapain tujuan , sasaran indikator dan kinerja program penanggulangan bencana;
- c. Sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan peprencanaan dan penganggaran yang di tetapkan di BPBD NTB;
- d. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kegiatan dan anggaran BPBD NTB
- e. Terpeliharanya kepercayaan dan citra masyarakat kepada pemerintah.

## C. URAIAN ORGANISASI

Unsur-unsur organisasi BPBD Provinsi NTB sebagaimana ketentuan Pergub NTB Nomor 14 Tahun 2009 terdiri dari Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

### a. Kepala Badan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dikepalai oleh seorang Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekertaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### b. Unsur Pengarah

Pasal 7 Ayat (1) menegaskan bahwa Unsur Pengarah terdiri dari unsur perangkat daerah, instansi pemerintah yang terkait serta masyarakat profesional dan ahli.

Pasal 8 Ayat (1) menegaskan bahwa Unsur Pengarah mempunyai tugas menyusun konsep pelaksana kebijakan penanggulangan bencana daerah serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, Dalam melaksanakan tugas, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- 2) Pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan bencana daerah; dan
- 3) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

### c. Unsur Pelaksana

#### 1. Pelaksana BPBD

Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat

dan pascabencana. Dalam melaksanakan tugas, Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
- b) Pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana di bidang penanggulangan bencana;
- c) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.

## **2. Sekretariat**

Tugas Sekretariat berdasarkan Pergub NTB Nomor 14 Tahun 2009 adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan BPBD;
- b) Penyiapan koordinasi penyeserasian program BPBD;
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Pelaksana BPBD;
- d) Penyusunan rencana kerja dan program Pelaksana BPBD;
- e) Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f) Pembinaan dan pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Sekretariat, membawahi :

- a) Subbagian Program;
- b) Subbagian Keuangan; dan
- c) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### **3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan Pergub NTB Nomor 14 Tahun 2009 adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan prabencana.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- b) Penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- c) Pelaksanaan koordinasi pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- d) Pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
- e) Pengkajian tindakan pengurangan risiko bencana;
- f) Penyusunan prosedur dan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- g) Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan dan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
- h) Pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan pelatihan tentang mekanisme tanggap darurat; dan
- i) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :

- a) Seksi Pencegahan; dan
- b) Seksi Kesiapsiagaan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

#### **4. Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan Pergub NTB Nomor 14 Tahun 2009 adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan tanggap darurat. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan dan strategi tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana;
- b) Penyusunan rencana kerja dan program tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana;
- c) Pelaksanaan koordinasi/komando tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana;
- d) Pengkajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- e) Penentuan status keadaan darurat bencana;
- f) Pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evaluasi masyarakat terkena bencana; dan
- g) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana.

Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :

- a) Seksi Tanggap Darurat; dan
- b) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

## **5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan Pergub NTB Nomor 14 Tahun 2009 adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pascabencana.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- b) Penyusunan rencana kerja dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- c) Penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana;
- d) Pelaksanaan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat pada wilayah pasca-bencana dengan sasaran normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
- e) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana pada wilayah pasca bencana dengan sasaran berkembangnya kegiatan perekonomian sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat; dan
- f) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :

- a) Seksi Rehabilitasi; dan
- b) Seksi Rekonstruksi.
- c) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

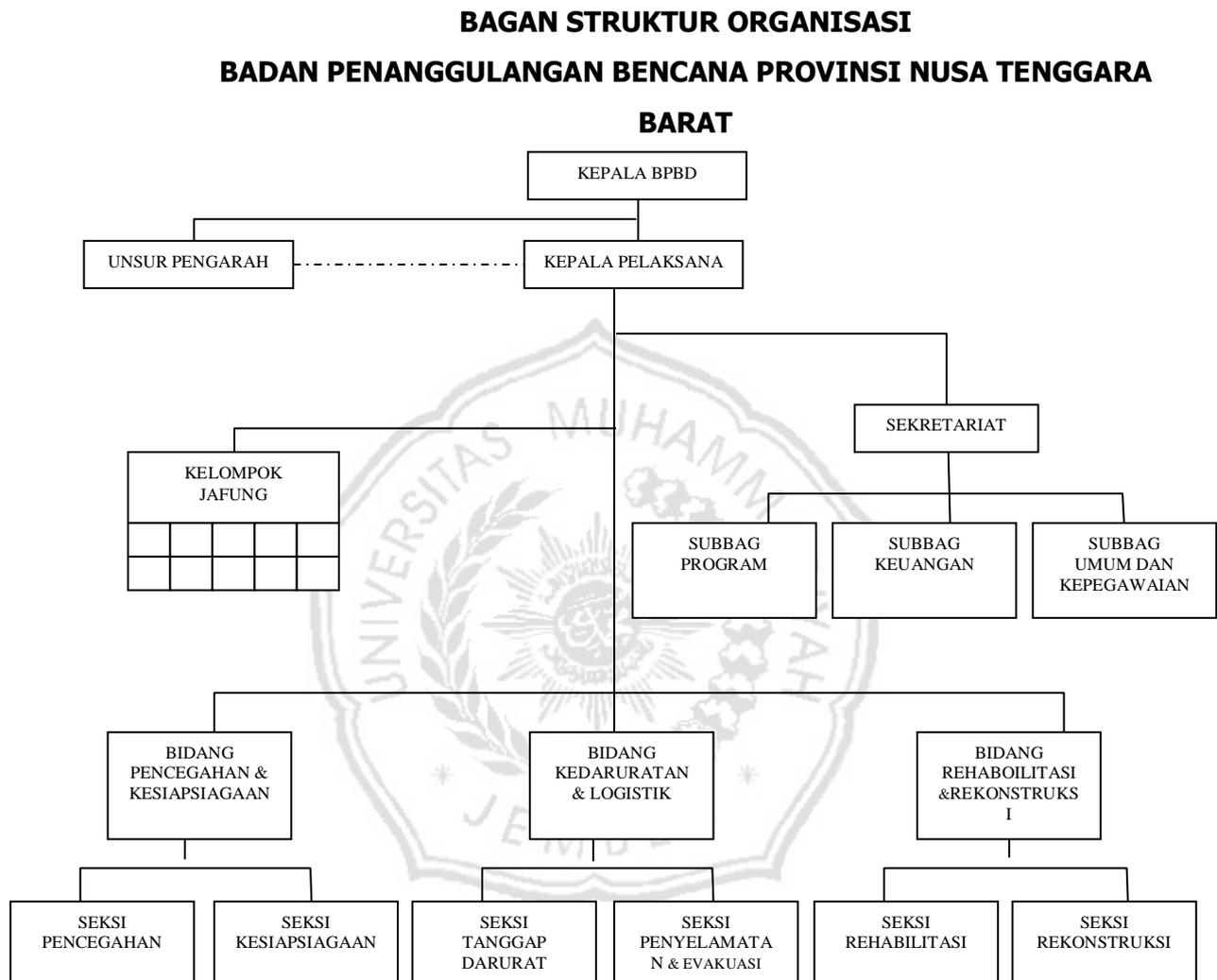
## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 27 Pergub NTB Nomor 14 Tahun 2009 menyatakan :

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kalak BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kalak BPBD.
- (4) Tenaga Fungsional Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Gubernur.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

#### d. Bagan Organisasi

Bagan organisasi pada Lampiran Pergub NTB Nomor 14 Tahun 2009



#### e. Susunan Kepegawaian

##### a. Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai BPBD Provinsi NTB sampai dengan Desember 2018 sebanyak 40 orang, dirinci berdasarkan pendidikan, golongan, jabatan, dan jenis kelamin, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1  
Distribusi SDM BPBD Provinsi NTB berdasarkan pendidikan

NO.	Pendidikan	Jumlah
1.	Pendidikan Doktoral / S-3	1
2.	Pendidikan Pasca Sarjana / S-2	4
3.	Pendidikan Saraja / S-1	20
4.	Pendidikan Diploma / D.IV	0
5.	Pendidikan Diploma / D.III	0
6.	Pendidikan Diploma / D.I	0
7.	Pendidikan SMK	4
8.	Pendidikan SMA	11
9.	Pendidikan SMPK	0
10.	Pendidikan SMP	0
11.	Pendidikan SD	0
	<b>Jumlah</b>	<b>40</b>

Tabel 1.2  
Distribusi SDM BPBD Provinsi NTB berdasarkan Golongan Tahun 2018

Golongan	Jumlah
IV	5
III	27
II	8
I	0
<b>Jumlah</b>	<b>40</b>

Tabel 1.3  
Distribusi SDM BPBD Provinsi NTB berdasarkan jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Struktural	14
2.	Jabatan Fungsional	0
3.	Tenaga Teknis Lainnya	0
4.	Arsiparis	0
5.	Staf Administrasi/Tata Usaha	26
	<b>Jumlah</b>	<b>40</b>

Tabel 1.4  
Distribusi SDM BPBD Provinsi NTB berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	29
2.	Perempuan	11
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>

#### D. ANALISA ISU STRATEGIS TERKAIT DENGAN TUPOKSI

Sejak dibentuknya BPBD Provinsi NTB pada tahun 2009, dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi menghadapi berbagai permasalahan baik disebabkan oleh factor internal dan external organisasi. BPBD Prov. NTB memiliki peluang dan Kekuatan kekuatan untuk tetap Eksis dalam pengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana

Beberapa permasalahan terkait dengan isu yang dihadapi dapat diidentifikasi seperti pada tabel 1.5 dibawah ini.

Tabel 1.5  
Keterkaitan Masalah dan ISU

No	Bidang	Masalah	Isu
1.	Sekretariat	1. Minimnya sarana dan prasarana 2. Kondisi sarana dan Prasarana belum memadai 3. Minimnya Kualitas dan Kuantitas tenaga Administarasi	1. Kurang responsifnya penangan bencana 2. Jumlah informasi kebencanaan daerah masih Rendah 3. Rendahnya Kualitas Pelayanan Adminstrasi

2	Bidang Kesiap Siagaan dan Pencegahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya Jumlah tenaga teknis yang mampu menganalisa kebencanaan</li> <li>2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana Komunikasi kebencanaan</li> <li>3. Minimnya regulasi daerah dalam mendukung upaya pengurangan resiko bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Belum mampu melakukan pemetaan daerah rawan bencana secara koperhensip</li> <li>2. Penangan bencana oleh Pemerintah Bersifat Sektoral</li> <li>3. Penanggulangan bencana belum mengakomodir kearifan lokal</li> </ol>
3	Bidang Kedaruratan dan Logistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya kualitas dan kuantitas tenaga teknis kedarurat dan logistik</li> <li>2. Minimnya regulasi daerah dalam mendukung upaya Penangan bencana darurat</li> <li>3. Minimnya Sarana Evakuasi</li> <li>4. Belum adanya SOP Penanggulangan bencana yang Optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah belum sigap pada kejadian bencana</li> <li>2. Penangan darurat bencana tidak koordinatif</li> <li>3. Kemampuan mengepakuasi Korban masih Rendah</li> <li>4. Penangan Bencana saat tanggap darurat masih Ego Sektoral</li> </ol>
4	Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya Kualitas dan kuantitas tenaga tehnik analisa dampak bencana</li> <li>2. Minimnya regulasi daerah dalam mendukung upaya penanganan DP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya korban bencana yang tidak mendapatkan bantuan pada tahap pasca bencana</li> <li>2. Penangan pasca bencana BPBD masih lambat</li> </ol>

## E. ANALISIA LINGKUNGAN STRATEGI (SWOT)

Peningkatan kapasitas BPBD Provinsi NTB dalam upaya penanggulangan bencana, dukungan lingkungan strategis juga tidak kalah openting, sehingga perlu dilakukan analisis lingkungan strategi dengan menggunakan metode SWOT sebagai berikut:

### **KEKUATAN (*S : STRENGTHS*) :**

1. Adanya peraturan perundang-undangan sebagai eksistensi dan kewenangan yang mendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
2. Dukungan pimpinan dan komitmen bersama seluruh aparatur

3. Komitmen melaksanakan perubahan paradigma dan reformasi dalam meningkatkan pelayanan.
4. Pemahaman terhadap arah dan tujuan organisasi.
5. Adanya komitmen yang kuat dalam penganggaran dari pemangku kebijakan ditingkat pusat dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana.
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dan berperan aktif dalam upaya penanganan bencana

**KELEMAHAN (*W = WEAKNESSES*):**

1. Kualitas aparatur penanggulangan bencana belum memadai
2. Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang
3. Belum optimalnya koordinasi dalam penanggulangan bencana sehingga system pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal
4. Belum terbentuknya unsur pengarah mekanisme kerjasama dengan dinas/intansi terkait, LSM dan lembaga-lembaga lain non pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana
5. Masih terbatasnya penganggaran, sarana, dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;

**PELUANG (*O = OPPORTUNITIES*) :**

1. Adanya komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD serta seluruh komponen bangsa, nasional, regional dan lokal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko bencana;
3. Dukungan kebijakan Pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana
4. Terbatasnya dana dekonsentrasi dan bantuan sosial berpola hibah dari

Pusat.

5. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel
6. Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/intansi terkait, LSM dan lembaga-lembaga lain non pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana

**ANCAMAN (*T = THREATS*):**

1. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan tiga fungsi pelayanan : koordinasi, Komando dan pelaksanaan dengan SKPD lainnya;
2. Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia;
4. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain; dan Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.
5. Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan.

Selanjutnya, hasil identifikasi SWOT dibuat perpaduan antara SO, WO, ST, dan WT untuk menentukan strategi seperti pada tabel 1.6 dibawah ini :

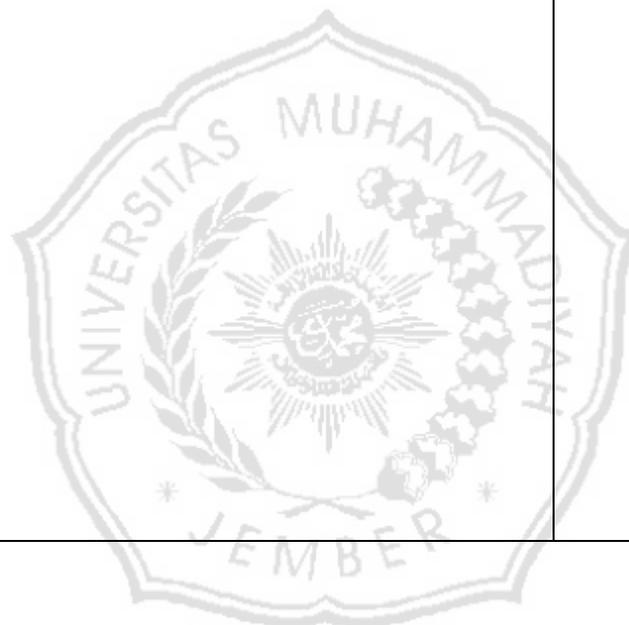
**Tabel 1.6**  
**Matriks SWOT**

	<b>STRENGTH (S)</b>	<b>WEAKNESS (W)</b>
<b>LINGKUNGAN INTERNAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peraturan perundang-undangan sebagai eksistensi dan kewenangan yang mendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah,</li> <li>2. Dukungan pimpinan dan komitmen bersama seluruh aparatur</li> <li>3. Komitmen melaksanakan perubahan paradigma dan reformasi dalam meningkatkan pelayanan.</li> <li>4. Pemahaman terhadap arah dan tujuan organisasi.</li> <li>5. Adanya komitmen yang kuat dalam penganggaran dari pemangku kebijakan ditingkat pusat dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana.</li> <li>6. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dan berperan aktif dalam upaya penanganan bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas aparatur penanggulangan bencana belum memadai</li> <li>2. Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang</li> <li>3. Belum optimalnya koordinasi dalam penanggulangan bencana sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal</li> <li>4. Belum terbentuknya unsur pengarah mekanisme kerja sama dengan dinas/intansi terkait, LSM dan lembaga-lembaga lain non pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana</li> <li>5. Masih terbatasnya penganggaran sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;</li> <li>6. Masih terbatasnya penganggaran sarana dan prasarana penyelenggara penanggulangan bencana</li> </ol>
<b>LINGKUNGAN EKSTERNAL</b>		

OPPRUNITIES (O)	SO	WO
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD serta seluruh komponen bangsa, nasional, regional dan lokal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;</li> <li>2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko - risiko bencana;</li> <li>3. Dukungan Kebijakan Pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana</li> <li>4. Terbatasnya dana Dekonsentrasi dan bantuan sosial berpola hibah bersumber dari Kementerian.</li> <li>5. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Penyusunan</b> PERDA penanggulangan bencana dan PROTAP</li> <li>2. <b>Pelatihan</b> Peningkatan kualitas Aparatur Badan Penanggulangan Bencana.</li> <li>3. <b>Fasilitasi</b> peningkatan fungsi Koordinasi, Komando dan Pelaksana pada program mitigasi Penanggulangan Bencana.</li> <li>4. <b>Koordinasi</b> dalam rangka penajaman Program Tahunan Penanggulangan Bencana.</li> <li>5. <b>Fasilitasi</b> keterlibatan masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan Penanggulangan Bencana.</li> <li>6. <b>Pelatihan</b> masyarakat dalam menghadapi bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pelatihan</b> peningkatan Kualitas aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan Bencana.</li> <li>2. <b>Koordinasi</b> penempatan Aparatur Badan penanggulangan Bencana Daerah sesuai disiplin ilmu dan <i>Job Discription</i>.</li> <li>3. <b>Pembentukan</b> dan Pengembangan PUSDALOPS.</li> <li>4. <b>Fasilitasi</b> RAKOR antar SKPD terkait Penanggulangan Bencana.</li> <li>5. <b>Pembentukan</b> Dewan Pengarah BPBD ditingkat Provinsi yang Independent dari berbagai unsur.</li> <li>6. <b>Penganggaran</b> Dana Siap Pakai/ On-Call dan Dana Lainnya di BPBD dalam Penanggulangan Bencana.</li> </ol>

<p>yang transparan, partisipatif dan akuntabel</p> <p>6. Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/intansi terkait, LSM dan lembaga-lembaga lain non pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana</p>		
TREATH (T)	ST	WT
<p>1. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan tiga fungsi pelayanan :koordinasi, Komando dan pelaksanaan dengan SKPD lainnya;</p> <p>2. Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;</p>	<p>1. <b>Sosialisasi</b> Peraturan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana.</p> <p>2. <b>Koordinasi</b> antara Badan Penanggulangan Bencana dan Legislatif dalam Penganggaran Penanggulangan Bencana.</p> <p>3. <b>Simulasi</b> dan Gladi Penanggulangan Bencana secara Kontinyu dan teratur dan terencana.</p> <p>4. <b>Kerjasama</b> dengan ORARI, RAPI, SAR, TAGANA dan Relawan Bencana lainnya dalam Penanggulangan Bencana.</p> <p>5. <b>Pengadaan</b> sarana dan Prasarana Transportasi dan Komunikasi yang handal dalam penanggulangan bencana.</p> <p>6. <b>Fasilitasi</b> penyusunan AMDAL yang lebih detail</p>	<p>1. <b>Penguatan</b> Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana daerah dalam Penanggulangan Bencana.</p> <p>2. <b>Pelatihan</b> Peningkatan Kualitas Aparatur dalam menunjang Profesionalisme dibidang Penanggulangan Bencana.</p> <p>3. <b>Fasilitasi</b> penyusunan Data Base berbasis GIS dan Internet.</p> <p>4. <b>Kerjasama</b> dengan Provider Telekomunikasi untuk tetap eksis bila bencana terjadi guna memperlancar koordinasi dalam Penanggulangan Bencana.</p> <p>5. <b>Fasilitasi</b> Rakor dalam rangka persamaan Persepsi bagi pemangku kepentingan dalam</p>

<p>3. Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencanaalam di dunia;</p> <p>4. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data kepusat maupun daerah lain; dan Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.</p> <p>5. Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan.</p>	<p>dalam pemberian izin berbagai jenis usaha yang terkait dengan lingkungan.</p>	<p>penanggulangan bencana terhadap daerah rawan bencana.</p> <p><b>7. Koordinasi</b> dalam meminimalisir kegiatan perambahan hutan dan daerah konversi serta Kerjasama dengan dunia Usaha dalam penanggulangan bencana.</p>
---	--	---



Dari tabel 1.6 diatas terlihat beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana sebagai berikut :

1. **Penyusunan** PERDA penanggulangan bencana dan PROTAP
2. **Pelatihan** Peningkatan kualitas Aparatur Badan Penanggulangan Bencana.
3. **Fasilitasi** peningkatan fungsi Koordinasi, Komando dan Pelaksana pada program mitigasi Penanggulangan Bencana.
4. **Koordinasi** dalam rangka penajaman Program Tahunan Penanggulangan Bencana.
5. **Fasilitasi** keterlibatan masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan Penanggulangan Bencana.
6. **Pelatihan** masyarakat dalam menghadapi bencana
7. **Pelatihan** peningkatan Kualitas aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan Bencana.
8. Koordinasi penempatan Aparatur Badan penanggulangan Bencana Daerah sesuai disiplin ilmu dan *Job Discription*.
9. **Pembentukan** dan Pengembangan PUSDALOPS.
10. **Fasilitasi** RAKOR antar SKPD terkait Penanggulangan Bencana.
11. **Pembentukan** Dewan Pengarah BPBD ditingkat Provinsi yang Independent dari berbagai unsur.
12. **Penganggaran** Dana Siap Pakai/ On-Call dan Dana Lainnya di BPBD dalam Penanggulangan Bencana.
13. **Sosialisasi** Peraturan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana.
14. **Koordinasi** antara Badan Penanggulangan Bencana dan Legislatif dalam hal Penganggaran Penanggulangan Bencana.
15. **Simulasi** dan Gladi Penanggulangan Bencana secara Kontinyu dan teratur dan terencana.
16. **Kerjasama** dengan ORARI, RAPI, SAR, TAGANA dan Relawan Bencana lainnya dalam Penanggulangan Bencana.
17. **Pengadaan** sarana dan Prasarana Transportasi dan Komunikasi yang handal dalam penanggulangan bencana.
18. **Fasilitasi** penyusunan AMDAL yang lebih detail dalam pemberian izin berbagai jenis usaha yang terkait dengan lingkungan.

19. **Penguatan** Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana daerah dalam Penanggulangan Bencana.
20. **Pelatihan** Peningkatan Kualitas Aparatur dalam menunjang Profesionalisme dibidang Penanggulangan Bencana.
21. **Fasilitasi** penyusunan Data Base berbasis GIS dan Internet.
22. **Kerjasama** dengan Provider Telekomunikasi untuk tetap eksis bila bencana terjadi guna memperlancar koordinasi dalam Penanggulangan Bencana.
23. **Fasilitasi** Rakor dalam rangka persamaan Persepsi bagi pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana terhadap daerah rawan bencana.
24. **Koordinasi** dalam meminimalisir kegiatan perambahan hutan dan daerah konversi serta Kerjasama dengan dunia Usaha dalam penanggulanganbencana.

## F. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan LAKIP BPBD Provinsi NTB Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4723)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
16. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
17. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan ke-2 atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
22. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005 – 2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018;
25. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN STRATEGIS

##### 1. VISI DAN MISI

###### a. Visi BPBD

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Sebagai unsur yang bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menetapkan visinya harus mengacu kepada visi Pemerintah Provinsi NTB dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya.

Memperhatikan Visi Pemerintah Provinsi NTB tersebut dan perubahan paradigma serta peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BPBD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 adalah :

***"Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Tangguh Adaptif Bencana".***

Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BPBD Provinsi NTB yang didalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi tersebut juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

###### b. Misi BPBD

1. Meningkatkan Kapasitas pelayanan internal dan data/informasi kebencanaan
2. Memantapkan kecepatan dan ketepatan penanganan bencana;
3. Mempercepat perwujudan kawasan tangguh bencana;
4. Meningkatkan keamanan, keselamatan dan keberlanjutan sarana prasarana wilayah pada kawasan rawan bencana.

## **2. SASARAN STRATEGIS**

### ***1. Terwujudnya Kawasan Tangguh Bencana***

Terwujudnya kawasan tangguh bencana adalah salah satu sasaran strategis dalam rangka upaya meminimalisir tingkat kerawanan bencana di Provinsi NTB. Sebagai mana diketahui bahwa Provinsi NTB adalah daerah rawan bencana, dimana hampir semua wilayah perdesaan baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa memiliki potensi kerawanan terhadap terjadi bencana. Salah satu bencana yang sering terjadi setiap tahunnya di hampir semua wilayah desa adalah kekeringan, banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Oleh karena itu, dengan meningkatkan kemampuan masyarakat di desa dalam upaya menangani guna penanggulangan bencana secara mandiri, menjadi strategis dalam mewujudkan NTB tangguh dan adaptif bencana.

### ***2. Terwujudnya Masyarakat Yang Sadar Dan Tanggap Terhadap Bencana***

Terwujudnya masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana adalah sasaran strategis yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemahaman dan pengetahuan tentang kebencanaan. Sasaran ini ditujukan bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap bencana, dalam hal ini sekolah/madrasah. Siswa atau pelajar adalah kelompok atau komunitas yang cukup rentan terhadap bencana sehingga perlu pembekalan dalam penanganan kebencanaan di sekolah dengan melibatkan seluruh komponen sekolah termasuk para guru, pegawai, dan masyarakat sekitar sekolah. Selain itu sasaran strategis ini juga menargetkan pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon), pelajar, relawan.

### ***3. Terwujudnya Sistem Penanganan Darurat Bencana Yang Koordinatif***

Terwujudnya Sistem Penanganan darurat bencana yang koordinatif merupakan sasaran strategis yang cukup penting dalam penanggulangan bencana saat tanggap darurat. Sasaran strategis ini adalah upaya mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang selama ini dialami saat kejadian bencana, seperti keterlambatan personil di lapangan saat kejadian bencana dan minimnya informasi. Oleh karena itu dengan terbentuknya Satuan Reaksi Cepat (SRC) maka koordinasi di lapangan dapat ditingkatkan.

#### ***4. Tersedianya Data Dan Informasi Daerah/Kawasan Rawan Bencana***

Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana sangat di perlukan karna merupakan sasaran strategis yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan informasi tentang daerah/kawasan rawan bencana. Kendala yang sering dialami pada saat penyusunan rencana penanggulangan bencana adalah tidak adanya profile kebencanaan yang dapat menggambarkan kondisi wilayah NTB dari berbagai aspek seperti demografi dan kondisi alam.

#### ***5. Tersedianya Sarana Dan Prasarana Penunjang Evakuasi Penanggulangan Bencana***

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana merupakan sasaran strategis terakhir yang fokus terhadap keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki BPBD Provinsi NTB dan sudah dibangunnya pusat informasi di kantor BPBD Provinsi NTB yang dibentuk pada Tahun 2009 melalui Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 masih memerlukan dukungan sarana dan prasarana baik perkantoran maupun peralatan lainnya.

### **3. INDIKATOR KINERJA**

Dari 6 (lima) sasaran strategis yang menjadi komponen dari perjanjian kinerja Gubernur NTB dan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB ditetapkan indikator pencapaian Kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Desa Tangguh Bencana

Kawasan dapat dimaknai sebagai suatu ciri serta mempunyai kehususan untuk menampung suatu kegiatan tertentu dengan berbagai latar belakang misalnya kawasan wisata, kawasan hutan lindung dan sebagainya. Dalam hal penanggulangan bencana desa dianggap sebagai satu kawasan yang memiliki karakteristik dan sistem pemerintahan terdepan, sehingga dengan melakukan penguatan kelembagaan Penanggulangan Bencana (PB) di desa maka risiko bencana dapat dikurangi.

2. Jumlah bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana.

Jumlah bantuan yang diberikan pada korban bencana dan daerah yang terkena dampak bencana. Bantuang ini berupa hibah, hal ini akan berpengaruh terhadap porsentase keberhasilan penganan bencana.

3. Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi

Ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program/kegiatan yaitu dengan cara melakukan evaluasi namun sebelumnya perlu dilaksanakan monitoring agar pem,bentukan desa tangguh bencana dapat memberikan dampak yang efektif dalam penanggulangan bencana.

4. Sekolah Aman Bencana adalah sekolah yang memenuhi standar-standar keselamatan baik dari segi fisik maupun non fisik. Bangunan sekolah yang telah memenuhi standar, siswa dan guru yang terlatih adalah indikator sekolah aman bencana. Oleh karena itu, dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa/pelajar dan guru serta masyarakat sekitar lingkungan dapat mewujudkan sekolah aman bencana sebagai salah satu upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana.

5. Peningkatan dan pembangunan Komunikasi dan Informasi  
Salah satu Komunikasi dan informasi kebencanaan yang efektif dimanfaatkan oleh berbagai stakeholder dalam memberikan informasi dalam upaya penanggulangan bencana adalah buku profil yang menggambarkan kondisi suatu wilayah baik dalam kondisi spasial, demografi dan sumberdaya.
6. Sarana Dan Prasarana Yang Dibangun: Ruang Komunikasi/Radio

### **3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategi BPBD NTB, Sejumlah strategi dan kebijakan dilaksanakan diantaranya:

- a. Strategi
  - 1) Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan desa tangguh bencana
  - 2) Fasilitas dan pengadaan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk penanganan darurat bencana
  - 3) Sosialisasi sekolah/madrasah aman bencana
  - 4) Pembuatan sarana gedung kantor (ruang komunikasi)
- b. Kebijakan
  - 1) Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa yang menjadi target Desa Tangguh Bencana
  - 2) Koordinasi dengan pemerintah Kabupaten / Kota yang terkena bencana
  - 3) Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota serta Sekolah yang menjadi target sekolah/Madrasah aman bencana
  - 4) Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan berkoordinasi dengan Pekar/ahli kebencanaan
  - 5) Berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD se- NTB, menyiapkan rencana dan anggaran
  - 6) Memperkuat koordinasidi dalam intern BPBD se-NTB
  - 7) Menyiapkan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi terhadap penanggulangan bencana

#### 4. PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2018

Program yang tercantum dalam DPA/DPPA BPBD Provinsi NTB Tahun 2018 diantaranya:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Perasaran aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan
- 5) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6) Program Siaga Darurat Bencana
- 7) Program Tanggap Darurat
- 8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- 9) Penanganan Tanggap Darurat dan Evakuasi/Penyelamatan Korban Bencana
- 10) Rehabilitasi dan Rekontruksi Penangan Penanggulangan Bencana
- 11) Peningkatan Partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam PRB
- 12) Peningkatan Kesiap Siagaan dan Pencegahan Bencana
- 13) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kebencanaan.

#### B. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja BPBD Provinsi NTB Tahun 2018 didasarkan kepada perjanjian kinerja antara Gubernur dengan Kepala pelaksana BPBD Provinsi NTB. Terdapat 6 sasaran strategis dalam perjanjian kinerja yang dapat diwujudkan pada tahun 2018 dengan pencapaian indikator sesuai dengan target yang ditetapkan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana	1. Tersedianya sarana penampungan air bersih (sumur bor dan kelengkapannya)	3 titik
2.	Terwujudnya masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana	2. Terbentuknya sekolah aman bencana/madrasah aman bencana	10 Sekolah
3.	Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana	3. Tersedianya dokumen penanganan potensi kekeringan dan banjir /tanah longsor	1 Dokumen
4.	Tertanganinya pasca bencana	4. Terlaksananya Rehabilitasi struktural dan non struktural serta Rekonstruksi pasca bencana	1 Dokumen
5.	Terwujudnya kawasan tangguh bencana	5. Terbentuknya desa tangguh bencana (Destana)	5 Desa
6.	Tersebarinya informasi kebencanaan	6. Tersedianya data dan informasi kebencanaan	1 Dokumen

Kondisi riil kantor BPBD Provinsi NTB sebagai instansi teknis yang melakukan penanganan bencana belum representatif untuk mewujudkan NTB adaptif dan tangguh bencana disebabkan masih minimnya sarana prasarana. Sarana yang dianggap penting diadakan pada tahun 2018 adalah pembangunan Gedung Komunikasi (Ruang Radio).

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat maka pada tahun 2018 ditetapkan sasaran, program dan kegiatan beserta indikator-indikatornya.

### 1. PENGUKURAN KINERJA

Indikator-indikator yang dipergunakan adalah masukan, keluaran dan hasil;. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran program dan kegiatan, maka ditentukan kategori persentase pencapaian sebagai berikut :

80 – 100 =	Tercapai
60 – 79 =	Kurang tercapai
< 59 =	Tidak tercapai

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan 6 (enam) Sasaran Kinerja Strategis pada tahun anggaran 2018. Pengukuran terhadap kinerja program dan kegiatan, untuk melihat pencapaian sasaran-sasaran berikut:

1. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana
2. Terwujudnya masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana
3. Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana
4. Tertanganinya pasca bencana
5. Terwujudnya kawasan tangguh bencana
6. Tersebarannya informasi kebencanaan

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat maka pada tahun 2018 ditetapkan sasaran, program dan kegiatan beserta indikator-indikatornya.

Indikator kinerja yang dipergunakan adalah keluaran sebagai hasil dari proses interaksi berbagai sumberdaya yang ada, sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2018.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasinya untuk setiap indikator.

## 2. ANALISIS AKUNTABILITAS

### a. Capaian Kinerja Strategis Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB sebagai instansi Pemerintah yang menangani urusan wajib Pelayanan Dasar telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan beserta sasarannya. Secara khusus, terkait dengan sasaran kinerja strategis Desa Tangguh Bencana dan Sekolah Aman Bencana disesuaikan dengan RPJMD Provinsi NTB 2013 – 2018.

**Sasaran : Terwujudnya Desa Tangguh Bencana dan Terwujudnya Masyarakat dan Terwujudnya Masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana,** dengan indikator peningkatan persentase **Jumlah Desa Tangguh Bencana dan Sekolah Aman Bencana,** Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi NTB 2013 – 2018, Indikator Kinerja Daerah dari aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB adalah **Persentase Desa Tangguh Bencana dan Sekolah Aman Bencana** yang diikhtiarkan semakin meningkat.

**b. Capaian Kinerja Organisasi**

Selain sasaran strategis **Pembentukan Desa Tangguh Bencana dan Sekolah Aman Bencana** sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB menetapkan pula sasaran kinerja organisasi, sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kinerja Tahunan 2018.

Target-target yang dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB terlihat dari indikator kinerja setiap sasaran strategis, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Desa Tangguh Bencana di Lokasi Rawan Bencana se Provinsi Nusa Tenggara Barat	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang terbentuk di Provinsi NTB	20 Desa	36 Desa

Perbandingan antara berbagai indikator sasaran strategis menunjukkan bahwa target yang ditetapkan terlampaui. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai sumberdaya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimanfaatkan untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Sasaran-sasaran strategis di atas didukung pula oleh kinerja sasaran organisasi atau sasaran institusional yang merupakan indikator dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja.

Adapun sasaran kinerja organisasi yang dimaksud adalah :

Sasaran 1 :

Meningkatnya Kualitas Program dan Pelaporan Urusan Kebencanaan

Tabel 3.2  
Indikator Untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Program dan Pelaporan  
Urusan Kebencanaan

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tahun	1	1	100
2	Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	Tahun	1	1	100
3	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	2	100
4	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja SKPD	Dokumen	40	40	100
5	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Program/ Kegiatan	Dokumen	1	1	100

Sasaran 2 :  
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan

Tabel 3.3  
Indikator Untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	1	100
2	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan	Tahun	1	1	100

Sasaran 3 :  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Sarana Prasarana Perkantoran

Tabel 3.4  
Indikator Untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum,  
Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Sarana Prasarana  
Perkantoran

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tahun	1	1	100
2	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Tahun	1	1	100
3	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tahun	1	1	100
4	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tahun	1	1	100
5	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tahun	1	1	100
6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Tahun	1	1	100
7	Terlaksananya Penyediaan Jasa Cetakan dan Penggandaan	Tahun	1	1	100
8	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tahun	1	1	100
9	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tahun	1	1	100
10	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	Tahun	1	1	100
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Tahun	1	1	100
12	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Tahun	1	1	100
13	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	1	1	100
14	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tahun	1	1	100
15	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tahun	1	1	100

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
16	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala	Tahun	1	1	100
17	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	1	1	100
18	Terlaksananya Pemeliharaan Arsip Kantor (Pengelolaan Arsip)	Tahun	1	1	100
19	Terlaksananya Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Tahun	1	1	100
20	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tahun	1	1	100
21	Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	Tahun	1	1	100
22	Terlaksananya Peningkatan Manajemen Asset/Milik Daerah	Tahun	1	1	100
23	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Paket	4	4	100

Sasaran 4 :  
Terwujudnya Kawasan Tangguh Bencana

Tabel 3.5  
Indikator Untuk Sasaran Terwujudnya Kawasan Tangguh Bencana

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Terbentuknya kawasan Desa Tangguh Bencana	Desa	5	5	100

Sasaran 5 :  
Terwujudnya Masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana

Tabel 3.6  
Indikator Untuk Sasaran Terwujudnya Masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Sekolah Aman Bencana	Sekolah	10	10	100

Sasaran 6 :

Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana

Tabel 3.8

Indikator Untuk Sasaran Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Peningkatan dan Pembangunan Komunikasi dan Informasi Bencana	Dokumen	1	1	100
2	Peningkatan Pengembangan Komunikasi dan Informasi Bencana	Orang	50	50	100

Sasaran 8 :

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana

Tabel 3.9

Indikator Untuk Sasaran Tersedianya sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana

Pelatihan

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Sarana dan prasarana yang dibangun (Ruang Komunikasi/Radio)	Paket	1	1	100

### c. Analisis Capaian Kinerja

Indikator kinerja pelayanan kesekretariatan yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Program dan Pelaporan Urusan Kebencanaan;
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Sarana Prasarana Perkantoran;

mencapai target, 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan kesekretariatan telah mendukung pencapaian sasaran-sasaran di bidang lain yang bersifat teknis.

Pelaksanaan kegiatan yang mendukung sasaran Terwujudnya Kawasan Tangguh Bencana, telah memenuhi target, 100 persen.

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah Terbentuknya Kawasan Desa Tangguh Bencana

Pada pembentukan desa tangguh bencana, berhasil membentuk 5 desa tangguh bencana.

Pada sasaran Terwujudnya Masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana persentase keberhasilan pencapaian kinerja sebesar 100 persen yang didukung oleh kegiatan Sekolah Aman Bencana.

Pada sasaran Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana telah memenuhi target 100 persen yang didukung oleh kegiatan peningkatan dan pembangunan serta pengembangan komunikasi dan informasi bencana.

Pada sasaran Tersedianya sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana telah memenuhi target 100 persen yang didukung oleh kegiatan pembangunan ruang komunikasi.

Analisis di atas menggambarkan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB selama tahun 2018, merupakan pewujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik atau per tahun.

Pada tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Perubahan sebesar Rp. 81.617.863.403,- dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung Rp.4.002.008.100,- realisasi keuangannya Rp. 3.672.569.609,-,-(91,77%) dan realisasi fisiknya 94,00%.
- Belanja Langsung Rp.77.615.855.404,- realisasi keuangannya Rp. 57.942.124.687,- (74,65.%) dan realisasi fisiknya 93,00% yang

dimanfaatkan dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan aparatur, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

#### d. Perbandingan Data Kinerja

Untuk mengetahui perkembangan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, maka capaian kinerja sasaran tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2018. Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 - 2018**

No	Sasaran	Capaian Kinerja		Program
		2017	2018	
1	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana	100	99,63	Program Siaga Darurat Bencana
2.	Terwujudnya masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana	100	97,46	Program Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana
3.	Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana	100	94,29	Program penanganan tanggap darurat dan evakuasi
4.	Tertanganinya pasca bencana	100	69,29	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5.	Terwujudnya kawasan tangguh bencana	100	99,63	Program Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat Dalam PRB
6.	Tersebarannya informasi kebencanaan	100	92,15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Memperhatikan perbandingan persentase capaian sasaran kinerja tahun 2017 dan tahun 2018, maka diketahui pula bahwa terjadi penurunan pencapaian organisasi hal ini disebabkan karena keterlambatan 2 (dua) paket pekerjaan disebabkan karena kegagalan dalam pelaksanaan tender yaitu paket pekerjaan pembangunan prasarana KTA (Konservasi Tanah dan Air) di Desa tarlawi dan 1 paket

pengadaan bibit di Desa Raba Kabupaten Bima sehingga diusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan pemanfaatan dana hibah untuk bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.

**e. Faktor Pendukung Pencapaian Sasaran**

Keberhasilan pencapaian sasaran yang diraih oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB tidak terlepas dari faktor-faktor :

1. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran yang tercantum dalam dokumen RPJMD NTB dan Rencana Strategis Badan.
2. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi urusan kebencanaan dengan pihak terkait, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten / Kota.
3. Pelaksanaan sosialisasi dan publikasi program dan kegiatan yang berkaitan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

**f. Langkah Antisipatif**

Dengan memperhatikan bahwa secara umum, program dan kegiatan kebencanaan telah mencapai bahkan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu antisipasi dengan cara mempertahankan koordinasi antara aparatur yang secara teknis memahami program dan kegiatan kebencanaan dengan stakeholder terkait. Oleh karena itu, perlu dirancang program-program kebencanaan yang kreatif dan aplikatif yang dapat mendukung pengurangan risiko bencana di Provinsi NTB.

**3. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Akuntabilitas keuangan pada Sekretariat, Bidang-bidang Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2018**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	4.002.008.100	3.672.569.609	91,77
2	<b>Belanja Langsung :</b>	77.615.855.403	57.942.124.687	74,65
	Sekretariat	3.510.739.640	3.365.942.889	95,88
	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3.554.550.763	3.535.576.452	99,47
	Bidang Kedaruratan dan Logistik	7.184.875.000	7.134.793.236	99,30
	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	63.365.69.000	43.905.812.110	69,29
	<b>J u m l a h</b>	81.617.863.403	61.614.694.296	75,49

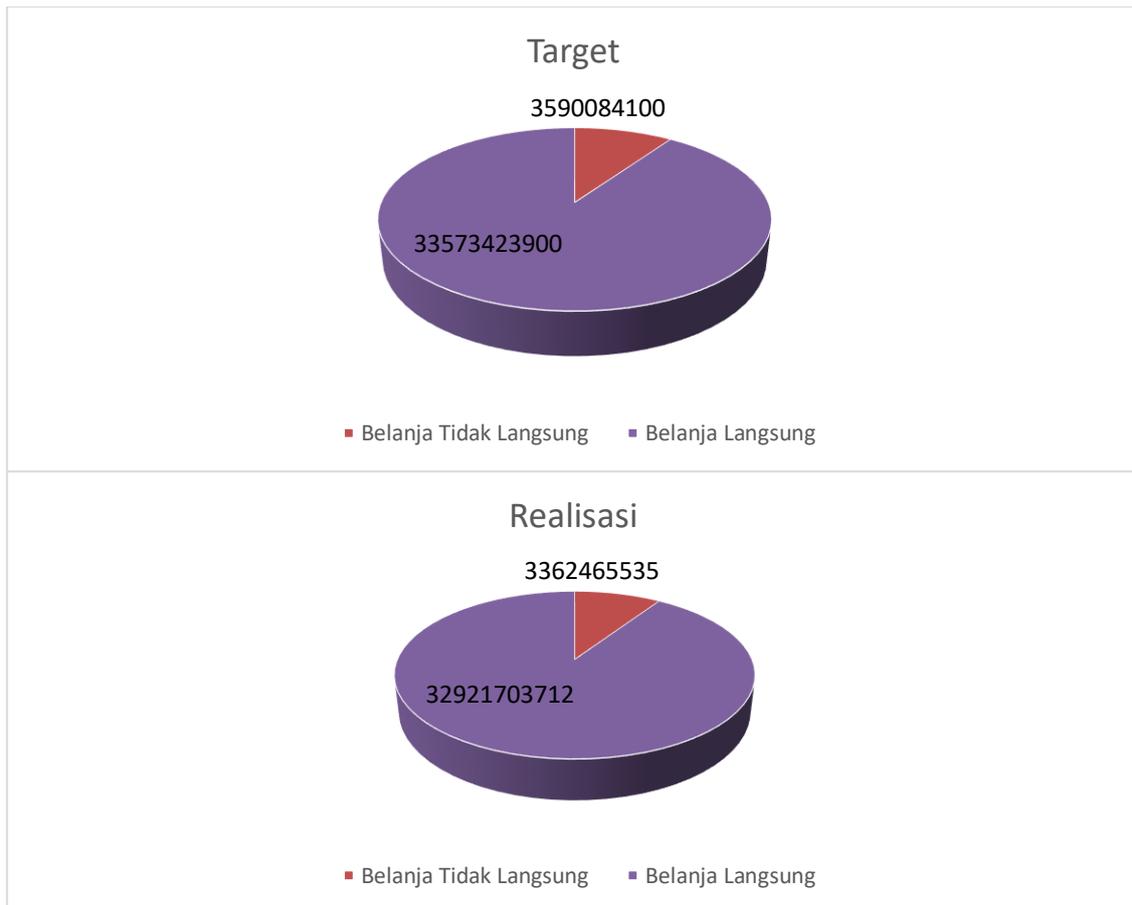
Efektifitas penggunaan anggaran dapat diketahui dari perbandingan antara realisasi Anggaran Belanja Langsung dengan alokasi atau target Anggaran Belanja Langsung, yaitu

Realisasi Anggaran Belanja Langsung  
X 100 %

Target Anggaran Belanja Langsung

Rp 57.942.124.687  
X 100 % = 0,75 [lebih kecil dari 1]

Rp 77.615.855.403  
maka dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB berhasil menggunakan anggaran tahun 2018 secara efektif.



Realisasi Belanja tidak langsung dan belanja langsung, tidak sesuai dengan target. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.672.569.609 atau 94,00% dari target sebesar Rp. 4.002.008.100. Sedangkan realisasi belanja langsung hanya mencapai 74,65% atau Rp. 57.942.124.687 dari target sebesar Rp. 77.615.855.403. Adapun penyebab realisasi Belanja Tidak Langsung tidak sesuai dengan target adalah tidak terserapnya anggaran accres sebesar 8% dari gaji pegawai disebabkan tidak adanya penambahan pegawai.

## BAB.IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Terdapat 6 (enam) sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja antara Gubernur NTB dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB yang mengarah pada penguatan kelembagaan dalam rangka memperkuat peran masyarakat, aparat dan relawan sebagai upaya yang menyeluruh terhadap pengurangan risiko bencana.
2. Beberapa indikator kinerja dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 sudah mencapai target yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam Renstra BPBD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 seperti jumlah desa tangguh bencana
3. Sasaran strategis tahun 2018 dapat dicapai 100% meskipun penyerapan anggaran tidak 100%
4. Terdapat dua indikator kinerja dari 2 Sasaran Strategis di dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2013 - 2018 yang mampu dicapai dan melampaui target pada tahun 2018 ini yaitu Indikator Desa Tangguh Bencana untuk terwujudnya Kasawan Tangguh Bencana, Indikator Sekolah/Madrasah Aman Bencana untuk Terwujudnya Masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana .
5. Jumlah dana APBD BPBD Provinsi NTB Tahun 2018 sebesar Rp. 81.617.863.503 dapat direalisasikan sebesar 75,49 % atau Rp. 61.614.694.296 dengan realisasi tertinggi pada Program *Siaga Darurat Bencana* (99,74%) dan terendah pada Program *Rehabilitasi dan Rekonstruksi* (75.49 %).
6. Kurang optimalnya pencapaian realisasi keuangan disebabkan keterlambatan 2 (dua) paket pekerjaan disebabkan karena kegagalan dalam pelaksanaan tender yaitu paket pekerjaan pembangunan prasarana KTA (Konservasi Tanah dan Air) di DesaTarlawi dan 1 paket pengadaan bibit di Desa Raba Kabupaten Bima sehingga diusulkan perpanjangan waktu

pelaksanaan pemanfaatan dana hibah untuk bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.

## **B. LANGKAH TINDAK LANJUT**

1. Meningkatkan kapasitas personil BPBD Provinsi NTB melalui pendidikan dan pelatihan teknis serta mengajukan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk penambahan personil sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
2. Mengorganisir data kebencanaan pada satu Subbagian yaitu Subbagian Program, agar mempermudah siapa pun mengakses informasi bencana melalui satu pintu
3. Memantapkan koordinasi antar bidang dan bagian di internal BPBD NTB
4. Mengembangkan data yang sudah terkumpul menjadi satu buku statistik, sehingga trend kebencanaan di NTB dapat terpublikasi.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pendeteksi bencana pada daerah/kawasan rawan bencana di seluruh wilayah Provinsi NTB melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Dunia Usaha.
6. Mengusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan pemanfaatan dana hibah untuk bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana sampai dengan 28 Desember 2019.

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ir. H. MOHAMMAD RUM, MT  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660316 199402 1 001

Lampiran 1.

## PERBANDINGAN REALISASI SEKOLAH AMAN BENCANA/MADRASAH AMAN BENCANA

NO	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		% Capaian		Program	Target/Anggaran		Realisasi Anggaran		% Capaian		% Fisik
	Uraian	2017	2018	2017	2018	Thd Tahun 2017	Thd Tahun 2018		2017	2018	2017	2018	Thd Tahun 2017	Thd Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7= 6:5 x 100%	8= 6:5 x 100%	9	10	11	12	13	14 = 13 : 12 X 100%	15 = 13 : 12 X 100%	16
1	Terbentuknya sekolah aman bencana/madrasah aman bencana	10	10	10	10	100	100	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam/penerpanan risiko bencana menuju sekolah/madrasah aman bencana	207.260.000,00	260.900.000,00	203.948.000,00	254.270.189,00	98,40	97,46	100

Lampiran 2.

**PERBANDINGAN REALISASI PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA**

NO	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		% Capaian		Program	Target/Anggaran		Realisasi Anggaran		% Capaian		% Fisik
	Uraian	2017	2018	2017	2018	Thd Tahun 2017	Thd Tahun 2018		2017	2018	2017	2018	Thd Tahun 2017	Thd Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7= 6:5 x 100%	8= 6:5 x 100%	9	10	11	12	13	14 = 13 : 12 X 100%	15 = 13 : 12 X 100%	16
1	Terbentuknya desa tangguh bencana (Destana)	1	1	1	1	100	100	Program Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB/Penerapan pengurangan bencana menuju desa tangguh bencana	398.652.500	3.293.650.763	397.829.600	3.281.306.263	99,79	99,63	100

## Lampiran 3

**Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018**

NO	Program/Kegiatan	Kegiatan				
		Indikator Kinerja Output dan Outcome	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ADMINISTRASI PELAYANAN PERKANTORAN</b>						
1	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	1 Tersedianya jumlah surat, peraturan perundang-undangan, map kantor dll yang dicetak dan digandakan	Buku	30	30	100
2	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2 Tersedianya bahan bacaan surat kabar	Tahun	1	1	100
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Tersedianya sarana jasa surat menyurat	Unit	1	1	100
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik	4 Tersedianya sarana komunikasi elektronik dan sumber daya listrik	Tahun	1	1	100
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan jasa kebersihan kantor	5 Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan serta tenaga kebersihan	Tahun	1	1	100
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan alat tulis kantor	6 Tersedianya ATK	Tahun	1	1	100
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 Tersedianya alat-alat listrik	Tahun	1	1	100
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan makan dan minum kantor	8 Tersedianya makan dan minum rapat	Kali	20	20	100
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan jasa	9 Tersedianya jasa keamanan kantor (satpam)	orang	7	7	100

	pengamanan kantor						
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	65	65	100
11	Program Administrasi Pelayanan Perkantoran/ Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	Tersedianya tenaga administrasi keuangan	Tahun	1	1	100
12	Program Administrasi Pelayanan Perkantoran/ Penyelarasan program pusat dan daerah	13	Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	Tahun	1	1	100
13	Program Administrasi Pelayanan Perkantoran/ Penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	14	Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah	Tahun	1	1	100

#### B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

14	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur / pembangunan gedung kantor	14	Tersedianya Gedung Kantor	Unit	1	1	100
15	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	16	Terpeliharannya gedung kantor	Tahun	1	1	100
16	Program Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		Tersedianya kendaraan	Unit	27	27	100
17	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	17	Terpeliharannya kendaraan dinas operasional.	Tahun	1	1	100

20	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur/Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	20	Terpeliharanya sarana kantor secara rutin	unit	36	36	100
<b>C. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>							
21	Peningkatan mental dan fisik aparatur	21	Pembentukan mental dan fisik	Kegiatan	2	2	100
<b>D. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>							
23	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan/Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD		Tersusunnya laporan kinerja SKPD	Dokumen	2	2	100
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan/Penyusunan Rencana Kerja SKPD		Tersusunnya laporan kinerja SKPD	Dokumen	3	3	100
<b>D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH</b>							
24	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan keuangan daerah/peningkatan manajemen aset/barang daerah	23	Tersusunnya dokumen asset/barang	Dokumen	1	1	100
<b>E. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PRB</b>							
25	Program Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB/Penerapan pengurangan bencana menuju desa tangguh bencana	25	Terbentuknya desa tangguh bencana (Destana)	Desa	5	5	100
<b>F. PROGRAM SIAGA DARURAT BENCANA</b>							
29	Program Siaga Darurat	28	Dokumen	%	1	1	100

	Bencana/Penanganan Darurat Bencana		penanganan darurat bencana				
<b>G. PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM</b>							
30	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam/pengurangan resiko bencana	28	Tersedianya dokumen resiko pengurangan bencana	kegiatan	2	2	100
33	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Penerapan pengurangan resiko bencana menuju sekolah/madrasah aman bencana	33	Terbentuknya sekolah aman bencana	sekolah	10	10	100
<b>H. PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT DAN EVAKUASI/PENYELAMATAN KORBAN BENCANA</b>							
35	Program Penanganan tanggap darurat dan evakuasi/penyelamatan korban bencana/pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	31	Adanya dokumen informasi bencana	dokumen	1	1	100
<b>I. PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>							
38	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan dan Penanggulangan Bencana/Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	34	Tersedianya laporan verifikasi kerusakan pasca bencana dan dokumen kajian penanggulungan bencana pasca bencana	Orang	30	30	100
<b>L. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EMDIA MASSA KEBENCANAAN</b>							
42	Program dan pengembangan komunikasi dan informasi bencana	41	Tersedianya informasi bencana	Orang	50	50	100

## Lampiran 4

**CAPAIAN KINERJA 2018**

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN ANGGARAN : 2018

NO	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja					Program/Kegiatan	REALISASI			Fisik (%)
			Uraian	Satuan	Tar get	Realisasi	%		PAGU	REALISASI	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Aparatur	1.	Tersedianya jumlah surat, peraturan UU, map kantor dll yang dicetak dan digandakan	Tahun	1	1	100	Program Administrasi Pelayanan Perkantoran/Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	15.691.500,00	15.268.575,00	97,30	100
		2.	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	Tahun	1	1	100	Program Administrasi Pelayanan Perkantoran/Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	10.080.000,00	9.985.000,00	99,06	100
		3.	Tersedianya kegiatan rutin pembinaan mental dan fisik aparatur	Kegiatan	2	2	100	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	18.00.000,00	11.000.000,00	61,11	100

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/Kegiatan	REALISASI			Fisik (%)	
		Uraian	Satuan	Tar get	Reali sasi	%		PAGU	REALI SASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Jumlah Sasaran 1</b>								<b>43.771.500,00</b>	<b>36.253.575,00</b>	<b>83,83</b>	<b>100,00</b>	
2	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Instansi	5.	Tersedianya sarana jasa surat menyurat	Tahun	1	1	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000,00	9.000.000,00	100	100
		6.	Tersedianya sarana komunikasi elektronik dan sumber daya listrik	Tahun	1	1	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik	113.817.537,00	106.179.252,00	93,29	96,00
		7.	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan serta tenaga kebersihan	Tahun	1	1	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan jasa kebersihan kantor	103.666.000,00	103.010.000,00	99,37	100
		8.	Tersedianya ATK	Tahun	1	1	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan alat tulis kantor	45.070.000,00	45.070.000,00	100	100

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/Kegiatan	REALISASI			Fisik (%)	
		Uraian	Satuan	Tar get	Reali sasi	%		PAGU	REALI SASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		9.	Tersedianya alat-alat listrik	Tahun	1	1	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.984.000,00	14.984.000,00	99,99	100
		10.	Tersedianya makan dan minum rapat	Tahun	1	1	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan makan dan minum kantor	149.500.000,00	141.826.150,00	94,87	98
		11.	Tersedianya jasa keamanan kantor (satpam)	orang	7	7	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan jasa pengamanan kantor	158.775.000,00	158.775.000,00	100	100
		12.	Terpeliharannya gedung kantor	Tahun	1	1	100	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur/Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	48.755.272,00	97,51	100

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/Kegiatan	REALISASI			Fisik (%)
		Uraian	Satuan	Tar get	Reali sasi	%		PAGU	REALI SASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13. Terpeliharannya kendaraan dinas operasional.	unit	27	27	100	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur/Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional/dinas	548.677.360,00	531.395.629,00	96,85	100
		14. Terpeliharannya perlengkapan gedung kantor	unit	18	18	100	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur/Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	31.138.000,00	28.601.057,00	91,85	95,00
		15. Tersedianya kendaraan	unit	3	3	100	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur/Pengadaan kendaraan dinas/operasional	375.000.000,00	349.046.975,00	93,08	96,00
		16. Terpeliharannya sarana kantor secara rutin	unit	36	36	100	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur/Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	40.000.000,00	39.250.355,00	98,13	100
		17. Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	Tahun	1	1	100	Program Administrasi Pelayanan Perkantoran/Penyelarsn program pusat dan	331.674.531,00	339.829.531,00	96,19	99,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/Kegiatan	REALISASI			Fisik (%)	
		Uraian	Satuan	Tar get	Reali sasi	%		PAGU	REALI SASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							daerah					
		18.	Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah	Tahun	1	1	100	Program Administrasi Pelayanan Perkantoran/Penyelarsan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	299.248.503,,00	298.293.143,00	99,68	100
		22.	Tersusunnya laporan kinerja SKPD	Doku men	2	2	100	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan/Penyusunan laporan capaian knerja dan ihtiar realisasi kinerja SKPD	89.527.240,00	89.526.100,00	100	100
		23.	Jumlah dokumen rencana kerja SKPD	Doku men	3	3	100	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan/Penyusunan Rencana kerja SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	100	100
<b>Jumlah Sasaran 2</b>								<b>2.375.078.171</b>	<b>2.318.542.464</b>	<b>97,62</b>	<b>100</b>	

NO	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja					Program/Kegiatan	REALISASI			Fisik (%)
			Uraian	Satuan	Tar get	Reali sasi	%		PAGU	REALI SASI	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Terwujudnya Manajemen Aset/barang yang lebih optimal	24	tersusunnya dokumen asset/barang	Doku men	1	1	100	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan keuangan daerah/peningkatan manajemen aset/barang daerah	25.000.000,00	24.365.350,00	97,46	100
<b>Jumlah Sasaran 3</b>								<b>25.000.000,00</b>	<b>24.365.350</b>	<b>97,46</b>	<b>100</b>	
4	Terwujudnya Kawasan Tangguh Bencana	25.	Terbentuknya desa tangguh bencana (Destana)	Desa	5	5	100	Program Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB/Penerapan pengurangan bencana menuju desa tangguh bencana	3.293.650.763,00	3.281.306.263,00	99,63	100
<b>Jumlah Sasaran 4</b>								<b>3.293.650.763</b>	<b>3.281.306.263</b>	<b>99,62</b>	<b>100</b>	
5	Terwujudnya Masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana	28.	Terbentuknya sekolah aman bencana/madrasah aman bencana	Sekolah	5	5	100	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam/penerpanan risiko bencana menuju sekolah/madrasah aman bencana	260.900.000,00	254.270.198,00	97,46	100

NO	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja					Program/Kegiatan	REALISASI			Fisik (%)
			Uraian	Satuan	Tar get	Reali sasi	%		PAGU	REALI SASI	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Jumlah Sasaran 5</b>									<b>260.900.000,00</b>	<b>254.270.198,00</b>	<b>97,46</b>	<b>100</b>
6	Terwujudnya sistem penanganan darurat bencana yang koordinatif	32.	Dokumen penanganan darurat bencana	Doku men	1	1	100	Program Siaga Darurat Bencana/Penanganan Darurat Bencana	6.610.000.000,00	6.592.768.236,00	99,74	100
		42.	terwujudnya penangan kerusakan pasca bencana dan	tahun	1	1	100	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Penanggulangan Bencana / Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PAsca Bencana	63.365.690.000,00	43.905.812.110,00	69,29	73.00
<b>Jumlah Sasaran 6</b>									<b>69.975.000,00</b>	<b>50.498.580,00</b>	<b>72,16</b>	<b>100</b>
7	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan	43.	Gedung Kantor	Unit	1	1	100	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur / pembangunan gedung kantor	400.000.000,00	399.177.000,00	99,79	100

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/Kegiatan	REALISASI			Fisik (%)	
		Uraian	Satuan	Tar get	Reali sasi	%		PAGU	REALI SASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	gan bencana											
<b>Jumlah Sasaran 7</b>								<b>400.000.000,00</b>	<b>399.177.000,00</b>	<b>99,79</b>	<b>100</b>	
8	Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana	44.	Jumlah peserta pelatihan frekuensi radio	Kegiat an	1	1	100	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa kebencanaan / Peningkatan dan pengembangan komunikasi dan informasi bencana	411.000.000,00	378.720.000,00	92.15	100
		45.	Pameran dalam rangka sosialisasi pengurnagan resiko bencana	Kegiat an	1	1	100	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam/sosialisasi pengurangan resiko bencana	305.717.500,00	288.537.500	94,38	100
<b>Jumlah Sasaran 8</b>								<b>716.717.500,00</b>	<b>667.257.500,00</b>	<b>93,10</b>	<b>100</b>	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/Kegiatan	REALISASI			Fisik (%)
		Uraian	Satuan	Tar get	Realisasi	%		PAGU	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Jumlah Sasaran 1+2+3+4+5+6+7+8</b>								<b>74.646.958.263,00</b>	<b>55.100.591.307,00</b>	<b>73,81</b>	<b>100</b>



Lampiran 5

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN ANGGARAN : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha aktif dalam penanggulangan bencana	a. Terlaksananya pemantauan dan penyebaran informasi	1 Dokumen
		b. Terlaksananya sosialisasi pengurangan risiko bencana	1 Kegiatan
		c. Terlaksananya peningkatan penanggulangan bencana masyarakat	1 Dokumen
		d. Tersusunnya Rencana Kontinjensi (Renkon)	3 Dokumen
		a. Terlaksananya penerapn pengurangan risiko bencana menuju kawasan aman bencana banjir dan tanah longsor	5 Lokasi
		b. Terwujudnya pengurangan daerah rawan kekeringan	70 Desa
		c. Terlaksananya Rapat koordinasi	50 Orang
		d. Terlaksananya penyediaan bahan, barang, peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan penanggulangan bencana	1 Kegiatan
		b. Terlaksananya penanganan siaga darurat bencana	100 %
		c. Terlaksananya pelatihan kaji cepat darurat bencana	55 Orang
2.	Tertanganinya pasca bencana	a. Teridentifikasinya lokasi pasca bencana	10 Lokasi
		b. Terlaksananya verifikasi tingkat kerusakan pasca bencana	7 Dokumen
		c. Terlaksananya pelatihan terapi dan konseling psikis/trauma	25 Orang

Mataram, Januari 2019  
Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Ir. H. MOHAMMAD RUM, MT**  
NIP. 19660316 199402 1 001